



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

TAHUN 2021



BAGIAN ORGANISASI & TATA LAKSANA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

TAHUN 2021



BAGIAN ORGANISASI & TATA LAKSANA

Kata Pengantar

PujiSyukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021” dapat kami selesaikan.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2021 dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Di samping itu merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban Visi, Misi dan Tujuan Kabupaten Penajam Paser Utara. Perlu diketahui bahwa perhitungan Nilai Capaian Kinerja dan Pengukuran Evaluasi Kinerja menggunakan indikator yang terbatas dan disesuaikan dari data yang tersedia.

Di samping itu, laporan ini diharapkan dapat dipakai sebagai gambaran tentang Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten PenajamPaser Utara dan merupakan satu di antara upaya sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ini disusun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Kami mengharapkan saran dan kritik demi sempurnanya penyusunan laporan ini, yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan di tahun mendatang.

Plt. Bupati Penajam Paser Utara,



Ir. H. Hamdam



Ringkasan Eksekutif

Perubahan sikap, mental dan perilaku aparatur sangat penting untuk menciptakan tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga pemerintah dituntut untuk lebih terbuka serta dapat melakukan pertanggungjawaban kegiatan kepada publik. Karenanya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021.

Laporan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021. Secara garis besar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program yang kesemuanya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2018-2023. Selanjutnya dari RPJMD ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021, serta untuk mengukur kinerja ditetapkan indikator kinerja sasaran.

Hasil capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan yang ditetapkan Tahun 2021 secara keseluruhan dan detail dituangkan pada lampiran Pengukuran Kinerja laporan ini. Adanya pandemi covid-19 memengaruhi pencapaian kinerja sehingga banyak indikator kinerja sasaran tidak mencapai target, hal ini tentunya akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dengan cara peningkatan kinerja melalui pengembangan inovasi, komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, serta masyarakat.

Berdasarkan nilai capaian kinerja sasaran pada Tahun 2021, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki rata-rata nilai capaian kerja sebesar 115,81% dalam kategori “Sangat Berhasil”. Dengan sasaran strategis sebanyak 19 sasaran dan 36 indikator kinerja.



Daftar Isi

Kata Pengantar	i	
Ringkasan Eksekutif	iii	
Daftar Isi	iv	
BAB I PENDAHULUAN	1	
	1	A. Gambaran Umum Daerah
	4	B. Kedudukan dan Fungsi Organisasi
	5	C. Sumber Daya Aparatur
	7	D. Isu Strategis dan Permasalahannya
	23	E. Sistematika Penyajian
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26	
	26	A. Visi dan Misi
	28	B. Tujuan dan Sasaran
	30	C. Indikator Kinerja, Strategi dan Arah Kebijakan
	37	D. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
	44	E. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46	
	46	A. Capaian Kinerja Organisasi
BAB IV PENUTUP	97	
	89	B. Realisasi Anggaran

Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Lampiran II Rencana Kinerja Tahun 2021

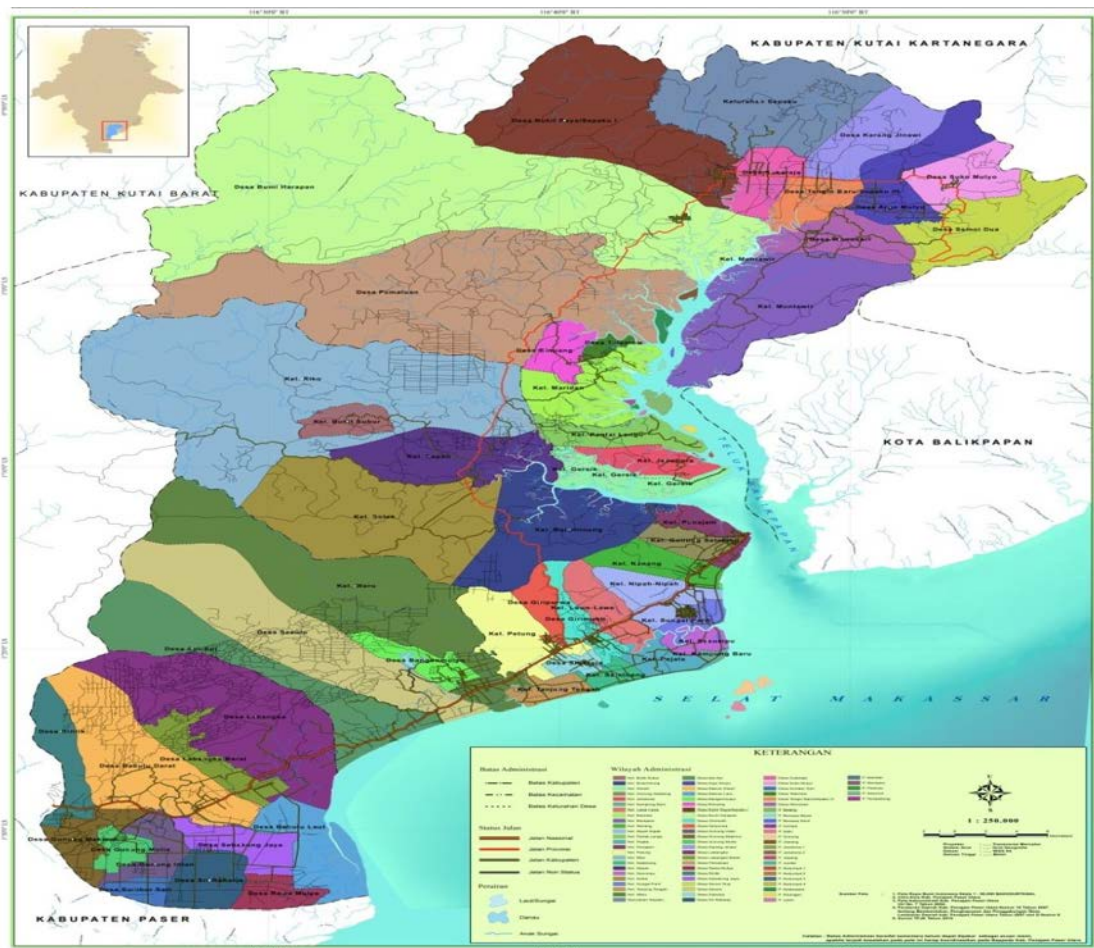
Lampiran III Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Lampiran IV Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A Gambaran Umum Daerah



Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Penajam Paser Utara secara geografis terletak



antara 00°48'29"-01°36'37" Lintang Selatan dan 116°19'30"- 116°56'35" Bujur Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah 3.333,06 Km² meliputi wilayah daratan seluas 3.060,82 Km² dan wilayah lautan seluas 272,24 Km².

Secara administratif pemerintahan Kabupaten PenajamPaser Utara terbagi atas 4 kecamatan, 24 kelurahan dan 30 desa yang terdiri dari :

**Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2021**

Kecamatan Penajam	Kecamatan Waru	Kecamatan Babulu	Kecamatan Sepaku
Kelurahan Tanjung Tengah	Kelurahan Waru	Desa Gunung Makmur	Kelurahan Maridan
Kelurahan Saloloang	Desa Api-api	Desa Gunung Intan	Kelurahan Mentawir
Kelurahan Lawe-lawe	Desa Sesulu	Desa Sumber Sari	Kelurahan Pemaluan
Kelurahan Pejala	Desa Bangun Mulia	Desa Sri Raharja	Kelurahan Sepaku
Kelurahan Petung		Desa Rawa Mulia	Desa Telemow
Kelurahan Kampung Baru		Desa Sebakung Jaya	Desa Binuang
Kelurahan Sesumpu		Desa Babulu Laut	Desa Bumi Harapan
Kelurahan Sungai Parit		Desa Babulu Darat	Desa Wono Sari
Kelurahan Nipah-nipah		Desa Labangka	Desa Semoi Dua
Kelurahan Nenang		Desa Rintik	Desa Argo Mulyo
Kelurahan Gunung Seteleng		Desa Gunung Mulia	Desa Suko Mulyo
Kelurahan Penajam		Desa Labangka Barat	Desa Tengin Baru
Kelurahan Buluminung			Desa Suka Raja
Kelurahan Sotek			Desa Bukit Raya
Kelurahan Sepan			Desa Karang Jinawi
Kelurahan Riko			
Kelurahan Pantai Lango			
Kelurahan Gersik			
Kelurahan Jenebora			
Desa Girimukti			
Desa Bukit Subur			
Desa Sido Rejo			
Desa Giri Purwa			

Jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2021 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berjumlah 186.801 jiwa. Penyebaran penduduk di masih belum merata di setiap kecamatan. Dengan melihat luas

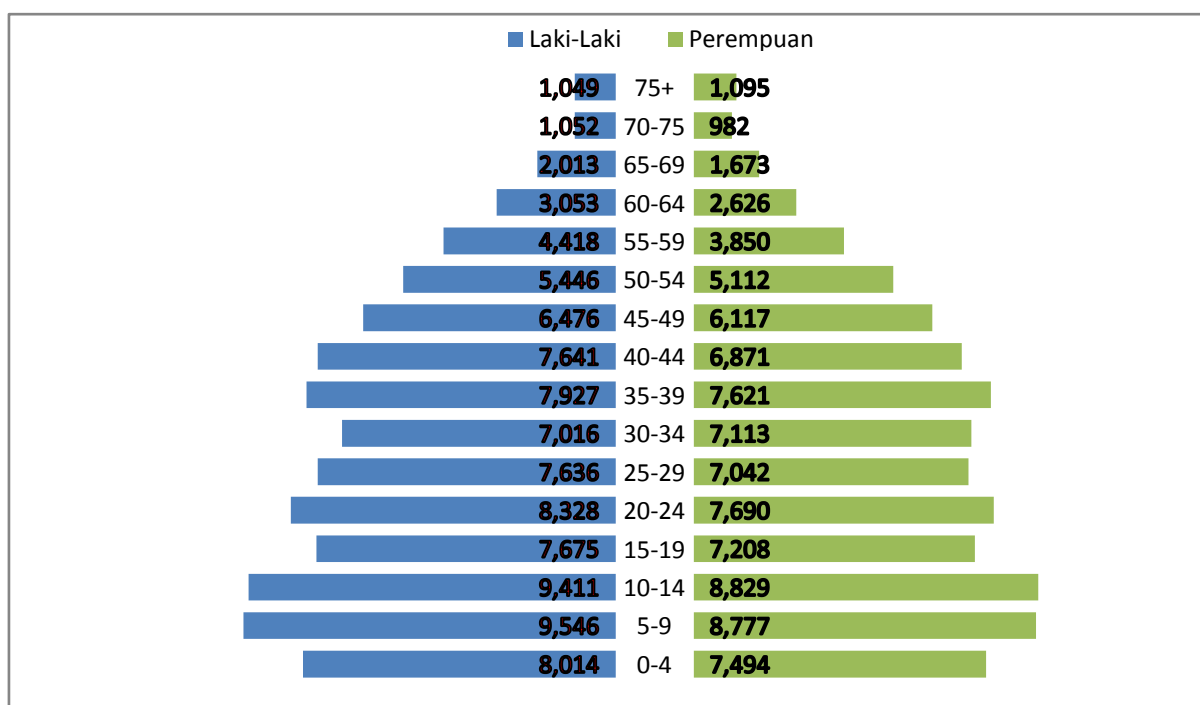


wilayah kecamatan dan jumlah penduduk, maka dapat dilihat kepadatan penduduk per km², dapat dilihat pada tabel berikut :

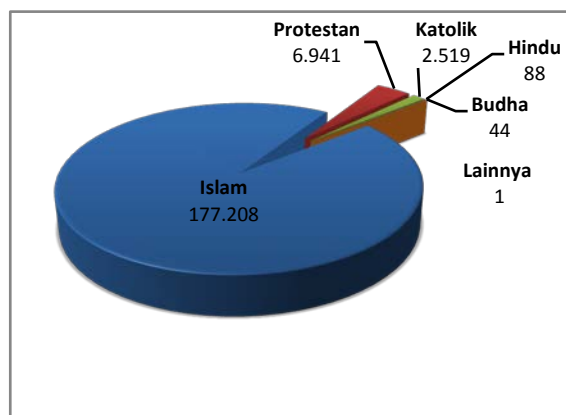
Penyebaran Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021

Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk	Kepadatan (per Km ²)
Penajam	1.207,37	90.323	74,81
Waru	553,88	20.254	36,57
Babulu	399,45	37.904	94,89
Sepaku	1.172,36	38.320	32,69
	3.333,06	186.801	56,04

Penduduk Penajam Paser Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021



Jumlah Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Agama yang Dianut, Tahun 2021



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai kewenangan mencakup semua kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,



moneter dan fiskal, agama, kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, system administrasi Negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu:

1. Seketariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
10. Dinas Sosial
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Dinas Ketahanan Pangan



14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Komunikasi dan Informasi
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
22. Dinas Perpustakaan dan Arsip
23. Dinas Perikanan
24. Dinas Pertanian
25. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31. Rumah Sakit Umum Daerah
32. Kecamatan Penajam
33. Kecamatan Waru
34. Kecamatan Babulu
35. Kecamatan Sepaku

C

Sumber Daya Aparatur

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu ditunjang oleh sumber daya aparatur yang memadai. Satu di antara tiga kebijakan pemerintah provinsi dan juga kebijakan utama yang akan diterapkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas masyarakat yang sebelum berlangsungnya otonomi daerah, masih ketinggalan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Peningkatan

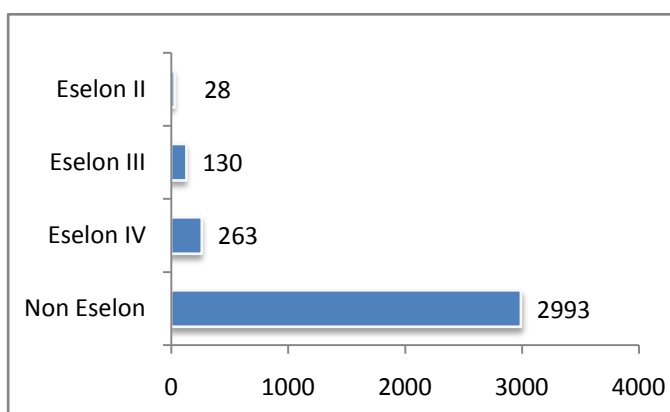


kualitas sumber daya manusia merupakan investasi yang tak ternilai harganya dan sangat berperan dalam kelangsungan kemajuan Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya di masa yang akan datang.

Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2021 berjumlah 3.414 Pegawai Negeri Sipil dengan gambaran komposisi aparatur menurut jabatan dan golongan adalah sebagai berikut :

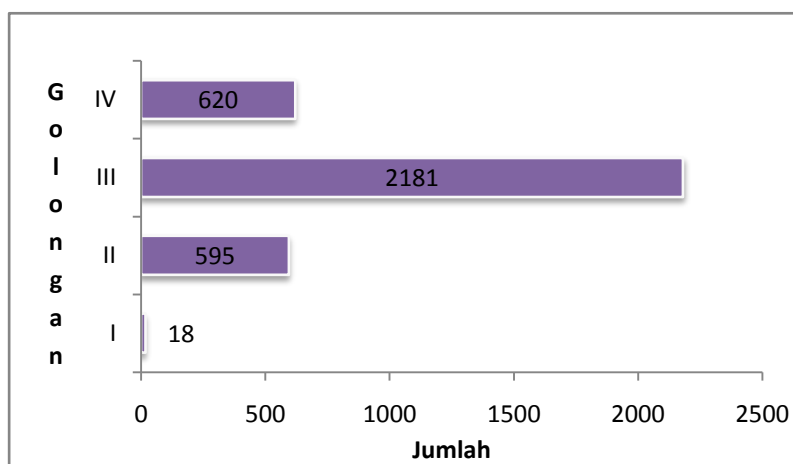
a. Berdasarkan Jabatan

Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2021



b. Berdasarkan Golongan

Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2021



Berdasarkan analisis masalah yang telah dilakukan, berikut identifikasi isu strategis secara internal yang ada dan dapat dikelola oleh Kabupaten Penajam Paser Utara. Isu ini harus mendapat perhatian untuk dikelola pada RPJMD yang akan datang sehingga tujuan pembangunan, visi dan misi yang dicanangkan oleh Bupati dapat dicapai dengan baik.

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Penajam Paser Utara 2015 - 2025

Dalam RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2015, maka Visi Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 adalah : **Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang berakhlak Baik, Mandiri, Sehat dan Sejahtera Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan.**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui delapan misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1) Mewujudkan revitalitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Penajam Paser Utara dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Kalimantan Timur, oleh karenanya untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi pertanian akan dilakukan terus menerus secara berkesinambungan. Revitalisasi pertanian, perkebunan dan perikanan dengan dukungan kebijakan pemerintah akan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menyerap tenaga kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

2) Meningkatkan sarana prasarana penunjang produktivitas ekonomi masyarakat.

Posisi Penajam Paser Utara yang berhadapan dengan Balikpapan dapat dikatakan sebagai pintu masuk arah Samarinda menuju Banjarmasin sehingga memiliki nilai strategis. Sarana pelayanan publik merupakan modal dasar pembangunan di suatu pemerintahan daerah dan tersedianya infrastruktur sosial dasar, perhubungan, telekomunikasi, informasi dan energi.

3) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, disiplin, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.

Mewujudkan visi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengembangkan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja pelayanan prima di berbagai sektor publik, yang didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang bertanggungjawab dan berwibawa dalam suasana politik dan hukum yang kondusif dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

4) Mewujudkan pembangunan agrobisnis subsistem budidaya dan subsistem hilir untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing daerah serta menciptakan dasar pengembangan agroindustri berdasarkan keunggulan dan daya saing pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Agrobisnis merupakan suatu kegiatan integratif dari hulu hingga pemasaran yaitu subsistem hulu, subsistem budidaya, subsistem hilir dan subsistem pemasaran. Potensi yang ada dan potensial untuk dikembangkan dalam sistem agrobisnis saat ini adalah subsistem budidaya dan subsistem pemasaran.

5) Menciptakan ekonomi kerakyatan yang maju dan berkesinambungan sebagai satu kesatuan dengan pembangunan agrobisnis dan agroindustri.

Keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) merupakan titik berat pembangunan agrobisnis dan agroindustri dimana secara umum UKM merupakan penopang ekonomi nasional dan mampu



menyerap tenaga kerja. Dukungan kebijakan pemerintah bagi UMKMK dan UMKMK yang partisipatif yang ditunjukkan dengan profil UMKMK yang transparan dan akuntabel akan melahirkan sinergi pembangunan ekonomi kerakyatan.

6) Mengembangkan potensi wilayah yang berwawasan lingkungan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup harus berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan harus dicegah baik itu pencemaran darat, laut maupun udara. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

7) Mewujudkan sumber daya masyarakat Penajam Paser Utara yang maju dan berakhlak baik.

Masyarakat yang maju dan berakhlak baik diharapkan mampu mewujudkan cita-cita Kabupaten Penajam Paser Utara, hal ini diwujudkan dengan melaksanakan program-program yang berkesinambungan di bidang peningkatan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan agama serta pendidikan agama serta pelestarian kebudayaan.

8) Mewujudkan jaringan intrastruktur transportasi dan prasarana utility yang handal dan terintegrasi satu sama lain di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Termasuk didalamnya tersedianya pasokan energi listrik yang cukup untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu tersediannya air bersih untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri serta sistem informasi berbasis elektronik yang mampu mendorong produktifitas sektor-sektor ekonomi.

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wajib dibagi dalam urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan dasar. Untuk urusan Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar



yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan pada pedoman SPM tersebut, Pemerintah Penajam Paser Utara telah memiliki dokumen SPM yang capaiannya disesuaikan dengan kondisi daerah.

3. Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan merupakan faktor kunci keberhasilan peningkatan daya saing. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem informasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem informasi.

Sejalan dengan isu internasional, nasional, regional maupun lokal, serta memperhatikan permasalahan yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya dalam kurun waktu 2019 – 2023, maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan;
2. Pemenuhan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat dan peningkatan kesadaran kesehatan lingkungan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dan jangkauan aksesibilitas layanan infrastruktur;
5. Penyediaan utilitas permukiman seperti air bersih, drainase, persampahan maupun air limbah;
6. Penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;
7. Peningkatan perekonomian dengan memperhatikan potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat serta lembaga-lembaga ekonomi setempat;



8. Pengembangan industri khususnya sektor sekunder dan tersier yang berdasarkan peningkatan nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
9. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas SDM aparatur dengan didukung pengembangan teknologi informasi;
10. Optimalisasi peningkatan PAD dengan memperhatikan prinsip-prinsip perekonomian berkeadilan;
11. Penciptaan iklim investasi melalui penyediaan infrastruktur dan regulasi;
12. Penguatan UKM dan Koperasi secara menyeluruh;
13. Peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka perwujudan *good governance*.

Secara umum permasalahan di Kabupaten Penajam Paser Utara diuraikan dalam permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebagai berikut:

1. Layanan Urusan Pemerintah Wajib

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- ✚ Penempatan tenaga pendidik (guru) belum dilakukan secara merata, masih terdapat kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
- ✚ Minimnya fasilitas perpustakaan dan laboratorium.
- ✚ Partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas masih rendah.
- ✚ Kurangnya jumlah dan kualitas Sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan pemuda dan olahraga yang layak.

2. Kesehatan

- ✚ Belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- ✚ Kurangnya ketersediaan dan kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan beserta sarana prasarana pendukung.
- ✚ Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
- ✚ Kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dari berbagai kelompok masyarakat masih belum optimal.



3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembangunan terus dilaksanakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur.

- ✚ Kualitas jalan terbangun masih rendah (jenis permukaan jalan masih didominasi untuk tanah timbunan dan agregat).
- ✚ Belum meratanya Penerangan Jalan Umum (PJU).
- ✚ Belum terpenuhinya ketersediaan bangunan gedung untuk pemerintahan.
- ✚ Rendahnya kualitas dan kuantitas irigasi.
- ✚ Belum tersedianya data dasar daerah irigasi beserta jaringannya yang berbasis teknologi informasi.
- ✚ Belum seimbang upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
- ✚ Belum terlaksananya peraturan tentang sumber daya air secara bijaksana agar pengelolaan dapat diselenggarakan secara seimbang dan terpadu.
- ✚ Masih minimnya kesiapan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
- ✚ Perda RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodir dinamika pembangunan.
- ✚ Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi penataan ruang serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
- ✚ Belum ditetapkan peraturan turunan perda RTRW guna mendukung rencana pengembangan wilayah dan dinamika pembangunan.
- ✚ Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya.

4. Perumahan Rakyat dan Permukiman

- ✚ Masih banyaknya rumah penduduk yang belum layak huni.
- ✚ Masih terbatasnya kemampuan penyediaan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- ✚ Persentasi kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman dengan kategori baik belum mencapai 100%.



- ✚ Masih banyak bidang tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat.
- ✚ Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi.
- ✚ Belum adanya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- ✚ Kondisi geografis Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cakupan wilayah yang cukup luas merupakan kendala bagi Satuan Pamong Praja untuk melakukan pemantauan secara maksimal.
- ✚ Masih terdapat masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.
- ✚ Infrastruktur penanganan bencana belum memadai.
- ✚ Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih belum tersentral pada ibukota Kabupaten.
- ✚ Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana belum terlatih.
- ✚ Kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam mematuhi peraturan.
- ✚ Sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban belum memadai.

6. Sosial

- ✚ Belum tersediannya *database* permasalahan sosial yang komprehensif dan terkini.
- ✚ Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan masih belum maksimal.
- ✚ Cakupan pelayanan program kesejahteraan social yang masih terbatas, sebagai dampak melemahnya fungsi koordinasi pada berbagai sektor.

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- ✚ Tingkat Pengangguran masih relatif tinggi.
- ✚ Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- ✚ Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik masih belum optimal.



- ✚ Lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada belum berperan secara maksimal.
- ✚ Penyelenggaraan pemenuhan hak anak sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sangat perlu untuk dioptimalkan.

3. Pangan

- ✚ Tingginya ketergantungan penduduk pada bahan pangan beras.
- ✚ Pola kemitraan dalam pengelolaan dan pemasaran hasil olahan belum terbentuk sepenuhnya.

4. Lingkungan Hidup

- ✚ Peran serta masyarakat dan sektor swasta masih tergolong rendah dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
- ✚ Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia belum sebanding dengan besarnya jumlah timbulan sampah dan luasnya daerah pelayanan kebersihan.
- ✚ Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan air limbah.

5. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- ✚ Data kependudukan belum akurat dan mutakhir.
- ✚ Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan belum menyeluruh.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- ✚ Kurang optimalnya pendampingan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan dan kelompok usaha ekonomi pedesaan.
- ✚ Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal.
- ✚ Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- ✚ Terdapatnya beberapa wilayah kelurahan yang berdasarkan kriteria pemekaran wilayah perlu diubah menjadi desa.
- ✚ Teknologi tepat guna belum dimanfaatkan secara optimal.
- ✚ Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dalam memahami regulasi.

7. Perhubungan

- ✚ Minimnya sarana, prasarana dan fasilitas pendukung perhubungan.



- ✚ Sarana dan prasarana terminal belum memenuhi syarat.
- ✚ Masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dll).

8. Komunikasi dan Informatika

- ✚ Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik belum optimal.
- ✚ *E-government* belum diimplementasikan secara optimal.
- ✚ Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai.

9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- ✚ Belum adanya penilaian kesehatan bagi koperasi maupun usaha kecil dan menengah.
- ✚ Belum adanya kerjasama antara koperasi, UKM dan lembaga keuangan (Perbankan).
- ✚ Rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola dan kesadaran anggota koperasi.
- ✚ Minimnya pendampingan yang bersifat menyeluruh/terintegrasi bagi UMKM, mulai dari sisi kualitas SDM pelaku UMKM, akses terhadap sumber daya produktif, permasalahan infrastruktur, pemasaran hingga kualitas dan kuantitas SDM aparatur dalam pembinaan dan pendampingan UMKM.
- ✚ Inovasi dan penerapan teknologi masih tergolong rendah.
- ✚ Rendahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan koperasi.

10. Penanaman Modal

- ✚ Kurangnya data potensi unggulan daerah.
- ✚ Data potensi penanaman modal belum memadai.
- ✚ Dibutuhkan dukungan infrastruktur dan regulasi.
- ✚ Lemahnya koordinasi dan fasilitasi lintas sektoral antar Perangkat Daerah

11. Kebudayaan dan Pariwisata.

- ✚ Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan dan menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dari luar daerah dan dunia internasional.



- ✚ Kurangnya promosi objek wisata.
- ✚ Destinasi pariwisata belum dikembangkan secara optimal.
- ✚ Masih kurangnya sarana dan prasana penyelenggaraan seni dan budaya daerah.
- ✚ Keterbatasan aksesibilitas dalam menjangkau obyek wisata.
- ✚ Peran serta masyarakat masih cukup rendah dalam pengembangan obyek wisata setempat.

12. Perpustakaan

- ✚ Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan termasuk kantor belum memadai.
- ✚ Belum adanya gedung perpustakaan yang representatif
- ✚ Rendahnya minat baca masyarakat.
- ✚ Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.
- ✚ Belum optimalnya peran perpustakaan sebagai wahana pembelajaran masyarakat.

2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Perikanan dan Kelautan

- ✚ Peningkatan produksi perikanan belum diikuti dengan penggunaan sarana tangkap yang ramah lingkungan.
- ✚ Sarana dan prasarana penunjang untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan masih terbatas.
- ✚ Keterbatasan tenaga penyuluh.
- ✚ Masih rendahnya nilai tambah pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

2. Pertanian

- ✚ Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian.
- ✚ Belum optimalnya tata guna dan tata kelola air pada lahan pertanian.
- ✚ Produktivitas peternakan masih belum optimal.
- ✚ Rendahnya kualitas produk peternakan dan nilai tambah dari pengolahan hasil peternakan masih sangat rendah.



3. Ketahanan Pangan

- ✚ Ketergantungan terhadap konsumsi pangan beras lebih tinggi daripada jenis pangan karbohidrat lainnya.
- ✚ Rendahnya ketahanan pangan terutama masyarakat miskin.

3. Fokus Layanan Penunjang Urusan

1. Pengawasan

- ✚ Kurangnya dukungan sumber daya manusia (SDM) aparatur baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- ✚ Masih rendahnya penerapan pengendalian internal pemerintah pada tiap Perangkat Daerah.

2. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

- ✚ Koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dokumen perencanaan belum optimal.
- ✚ Proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi belum terlaksana dengan baik.
- ✚ Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah.
- ✚ Proses perencanaan dengan penganggaran, yang mengarah kepada pengalokasian sumber daya yang lebih rasional dan strategis belum terwujud dan tidak sepenuhnya dirumuskan dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

3. Keuangan

- ✚ Pengelolaan aset daerah masih belum optimal.
- ✚ Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu memberikan kontribusi yang memadai terhadap Pendapatan Daerah.

4. Kepegawaian

- ✚ Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) masih relatif rendah.
- ✚ Distribusi dan jumlah ASN belum seimbang dengan beban kerja.



- ✚ Masih terbatasnya jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- ✚ Masih terbatasnya jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.
- ✚ Jumlah jabatan fungsional masih sangat terbatas.

5. Pemerintahan Umum

- ✚ Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal.
- ✚ Perlunya ditingkatkan kerjasama dengan daerah lain dan pihak swasta, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, yang dalam jangka pendek dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
- ✚ Belum optimalnya sistem pengawasan internal pada masing-masing perangkat daerah.

4. Daya Saing

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi daya saing daerah yang cukup tinggi karena memiliki keberadaan sumber daya alam (*natural resources*) melimpah seperti mineral & batubara, minyak bumi & gas, pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Dengan ditunjang oleh posisi strategis Kabupaten Penajam Paser Utara secara geografi yang berada pada jalur lintas transportasi Kalimantan, dimana menjadi jalur penghubung antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, juga berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan, sebagai kota yang berdimensi Jasa dan Industri serta sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur dengan keunggulan infrastruktur khususnya dibidang transportasi udara dan laut serta dibidang informasi dan teknologi, yang pada akhirnya semakin memperkuat daya saing Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal aksesibilitas informasi dan transportasi. Daya saing daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dicermati dari kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan ekonomi daerah ini sendiri dapat dianalisa dari empat (4) aspek penting. Aspek yang pertama adalah kemampuan ekonomi daerah, aspek ke dua infrastruktur, aspek ke tiga iklim investasi dan aspek ke empat sumber daya manusia.



4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Penajam Paser Utara menunjukkan tanda semakin membaik, terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan arah positif.

Nilai PDRB PPU (ADHB) selama periode 2013-2017 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Pada tahun 2013, PDRB PPU (ADHB) sebesar Rp 6,98 triliun dan mencapai Rp 8,45 triliun pada tahun 2017.

4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

4.2.1 Perhubungan

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi darat dan memiliki peran penting dalam mobilitas antar 54 desa/kelurahan, 4 kecamatan, antar 3 Kabupaten serta Kota bahkan lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Sistem transportasi Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki karakteristik yang cukup kompleks dengan baik melalui darat maupun laut/perairan.

Untuk transportasi udara, saat ini sistem angkutan dan pergerakannya mengikuti pengembangan sarana prasarana yang ada di Kota Balikpapan.

Untuk transportasi darat, berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah membangun jalan sepanjang 1.240,96 km. Rel Kereta Api direncanakan akan dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdapat 2 jalur kereta api yakni pertama yang dibangun pihak swasta yaitu kereta api borneo (dibangun oleh Russian railways), yang kedua dibangun oleh kementerian perhubungan direktorat jenderal perkeretapihan. Kereta api yang digunakan untuk barang dan penumpang. Untuk jalur kereta



api borneo melalui kawasan industri Buluminung menuju Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Sedangkan jalur kereta api yang dibangun oleh kementerian perhubungan dari Kabupaten Kutai Timur, melalui Penajam menuju Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan.

Sedangkan transportasi air, Pembangunan jembatan Pulau Balang, rencana pembangunan jembatan Nipah-Nipah – Melawai merupakan salah satu cara menghubungkan antar wilayah yang dipisahkan oleh teluk. Saat ini transportasi laut menuju dari dan ke Kota Balikpapan dilakukan dengan menaiki Fery, Speed boat dan perahu kelotok.

4.2.2 Penataan Ruang

Berdasarkan identifikasi kondisi lahan yang ada, Penajam Paser Utara memiliki kawasan produktif yang masih sangat luas untuk dikembangkan. Dari luas kawasan budidaya yang meliputi 288.623 Ha, baru 12,03% yang dimanfaatkan (Pola ruang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2030). Luas wilayah industri berdasarkan Pola Ruang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2030 adalah seluas 842 Ha, sedangkan luas budi daya adalah seluas 288.621 ha. Kawasan gerakan tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas \pm 8.400 Ha. Luas lahan kering tanaman pangan yang terdapat dalam pola ruang RTRW sebesar 22.285 Ha. Sedangkan, luas wilayah perkotaan berdasarkan pola ruang RTRW adalah seluas 7.359 Ha.

4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka menarik minat investasi, Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan perbaikan, pembenahan sarana dan prasarana baik berupa penyiapan kawasan seperti penetapan kawasan industri buluminung maupun kelengkapan fasilitas infrastruktur dan suprastruktur serta kebijakan.

Kondisi jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan jenis permukaan Tahun 2018, bahwa total jalan yang masuk kondisi mantap



sebesar 43 persen lebih. ketersediaan bendung Lawe-Lawe yang diharapkan rampung tahun ini, mampu menyuplai kebutuhan air bersih wilayah penajam dan sekitarnya serta menyuplai kawasan industri Buluminung kedepannya. Surplus energi listrik melalui sambungan barito dan sambungan Mahakam diharapkan mampu menarik investor masuk ke Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kondisi keamanan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikatakan kondusif. Dimana tidak pernah terjadi konflik horizontal selama Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk mulai Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2018.

Terkait kebijakan pelayanan publik secara prima, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara meluncurkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten) pada tahun 2015. Seiring berjalannya waktu hingga saat ini inovasi-inovasi dalam hal pelayanan publik terus diciptakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

4.4.1 Rasio Tingkat Pendidikan Penduduk

Berdasarkan data pada tahun 2017, jumlah lulusan S1/S2/S3 sebanyak 1.934 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 157.711, sehingga diperoleh Rasio Lulusan sebesar 254,64 atau dapat diartikan bahwa pada setiap 10.000 penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 122 orang yang berpendidikan S1/S2/S3.

4.4.1 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong maju atau sedang berkembang.



Demografi Kabupaten Penajam Paser Utara, tahun 2018 mengalami penurunan nilai Rasio yang artinya mengalami pengurangan beban penduduk yang ditanggung. Pada tahun 2018, dengan nilai Rasio Ketergantungan sebesar 41,3 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara (dianggap produktif), mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang (dianggap belum dan tidak produktif).

4.4.2 Rencana Pengembangan Kawasan

Rencana pengembangan kawasan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada kurun waktu 2014 - 2018 diarahkan kepada pengembangan wilayah pesisir, namun juga tidak mengesampingkan pengembangan pada wilayah-wilayah lainnya.

Konsep pengembangan wilayah yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara, dapat dijabarkan kedalam 4 Zona yaitu :

1. **Zona SATU** adalah wilayah sepanjang jalur teluk Balikpapan yang berada di wilayah Kecamatan Sepaku yaitu sepanjang Mentawir, Semoi-Sepaku dan wilayah Maridan (ITCI). Kawasan ini merupakan wilayah yang dikhususkan untuk perkembangan kegiatan industri perkayuan, perkebunan kelapa sawit (beserta produk turunannya), peternakan, dan sebagian berfungsi sebagai pelabuhan batubara, secara fungsi merupakan masuk zona *"working waterfront"*.
2. **Zona KEDUA** adalah zona Industri, pelabuhan dan penelitian meliputi wilayah sepanjang teluk Balikpapan yang berada di wilayah Kelurahan Buluminung, Gersik, Jenebora, Pantai Lango dan sekitarnya. Akses penghubung yang digunakan adalah Jembatan Pulau Balang. Investasi yang telah masuk antara lain adalah pelabuhan CPO Astra, Supply Base Eiscal, Pelabuhan Pemda, Pelabuhan atau Terminal Khusus Batubara PT. PenajamPrima Coal, PT. BMS, PT. Cipaganti Resources dan Perusda BenuoTaka. Investasi yang akan masuk antara lain : Pabrik Ethanol, Smelter Nikel, dan Pusat Penelitian Kelautan BPPT.



3. **Zona KETIGA** adalah gabungan antara:

- a) *Mixed Used Waterfront* adalah *waterfront* yang merupakan kombinasi dari perumahan, perkantoran, restoran, pasar, rumah sakit, pendidikan dan/atau tempat-tempat kebudayaan.
- b) *Recreational Waterfront* adalah adalah semua kawasan *waterfront* yang menyediakan sarana-sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi, seperti taman, arena bermain, tempat pemancingan, dan fasilitas untuk kapal pesiar.
- c) *Residential Waterfront* adalah perumahan, apartemen, dan resort yang dibangun di pinggir perairan. Lokasinya adalah sepanjang jalur *coastal road* yang berada di wilayah Nipah nipah, Sungai Parit, hingga wilayah pelabuhan penyeberangan ferry. Bahkan dalam perencanaan ke depan akan diperluas hingga ke Pantai Tanjung Jumalai. Penghubung yang direncanakan adalah Jembatan PPU – Balikpapan, Jalur Nipah nipah – Melawai, menghubungkan dua *Coastal Road* antar dua wilayah.

4. **Zona EMPAT** adalah zona yang meliputi wilayah pesisir pantai yang langsung menghadap dengan Selat Makassar, wilayah tersebut meliputi Kecamatan Babulu dan Waru yang secara khusus akan menjadi pengembangan sektor budidaya perikanan dan sejenisnya, termasuk juga akan dikembangkan sebagai sentral pertanian yang diharapkan akan jadi lumbung pangan bagi Kalimantan Timur.

E

Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021 ini menyajikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selama tahun 2021 berdasarkan perjanjian kinerja dan perbandingan dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya serta capaian terhadap kondisi akhir RPJMD sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah, dimana tahun 2021 ini merupakan tahun ketiga RPJMD 2018-2023.

Laporan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah dibelanjakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1). Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- 2). Rencana Kinerja Tahun 2021
- 3). Pengukuran Kinerja Tahun 2021
- 4). Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran serta bagaimana cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dokumen resmi sudah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2021 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2021. Rencana Kinerja dalam Tahun 2021 berbentuk dokumen resmi yang disusun di awal Tahun 2021, yang merupakan Program Kerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

A Visi dan Misi

Sesuai dengan tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan mandat, serta dengan melihat latar belakang dan mencermati isu-isu strategis yang berkembang, maka visi Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Maju, Modern, dan Religius”

Penjabaran arti dari visi tersebut antara lain :

1. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang **maju**
Meningkatnya kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan system dan kelembagaan politik dan hukum.
2. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang **modern**
Mampu dan setara dalam menerapkan dan mensenergikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan kemajuan teknologi kekinian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang **religius**

Mewujudkan kehidupan masyarakat sejajar, sederajat dan seimbang dunia dan akhirat menuju masyarakat berakhlak mulia, aman dan damai serta hidup berdampingan antara sesama pemeluk agama dilandaskan Lakum dinnukum Waliyadin dan Pancasila.

Misi untuk mencapai cita-cita dalam visi di tuangkan dalam 11 (sebelas) misi, yakni:

- 1 *Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran*
- 2 *Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu*
- 3 *Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan*
- 4 *Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas.*
Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan
- 5 *Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan*
- 6 *Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman*
- 7 *Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas.*
- 8 *Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas.*
Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah.
- 9 *Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.*
- 10
- 11



Tabel dibawah ini menyajikan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara.

**Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Penajam Paser Utara**

Misi	Tujuan	Sasaran
1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran	1 Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	1 Meningkatkan perekonomian masyarakat
	2 Pengurangan angka pengangguran	2 Mengurangi angka pengangguran
2 Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu	3 Peningkatan minat investasi didukung pembangunan infrastruktur	3 Meningkatkan investasi di kawasan industri
3 Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan	4 Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter	4 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
		5 Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda
		6 Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4 Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas	5 Mewujudkan ketahanan pangan yang handal	7 Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)
		8 Meningkatkan distribusi pangan
5 Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan	6 Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing	9 Meningkatkan daya saing daerah
		10 Meningkatkan kerjasama perekonomian

Misi	Tujuan	Sasaran
6 Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan	7 Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa dan kelurahan	11 Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan
7 Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman	8 Memantapkan infrastruktur daerah	12 Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan
	9 Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW	13 Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman
	10 Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana	14 Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan
8 Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas	11 Optimalisasi PAD	15 Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi
9 Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas	12 Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	16 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
10 Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah	13 Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan	17 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web



Misi	Tujuan	Sasaran
11 Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.	14 Meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaan	18 Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama
	15 Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	19 Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan

C

Indikator Kinerja, Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi RPJMD merupakan prioritas pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan. Strategi dan arah kebijakan RPJMD dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta memedomani Prioritas Nasional.

Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.



**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Kabupaten Penajam Paser Utara**

Misi 1

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan ekonomi masyarakat dengan perluasan lapangan kerja	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian ekonomi
Pengurangan angka pengangguran	Mengurangi angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dengan kemampuan kreatifitas dan inovasi yang bersaing global	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat kecil menengah
			Pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu Strategi	Pengembangan industri pengolahan produk lokal daerah
				Perluasan dan penyediaan lapangan kerja
				Meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dengan mendorong pertumbuhan sektor industri, jasa, perdagangan dan penguatan UMKM
				Meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan serta harmonisasi hubungan industrial

Misi 2**Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan minat investasi didukung pembangunan infrastruktur	Meningkatkan investasi di kawasan industri	Nilai investasi	Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan industri Buluminung	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas daerah

Misi 3**Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Peningkatan kualitas pendidikan	Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Pembangunan ruang kelas belajar (RKB) beserta fasilitas pendukungnya
		Angka Harapan Hidup (Tahun)		Peningkatan akses pendidikan usia dini (PAUD)
	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat propinsi dan Nasional		Peningkatan kualitas tenaga pengajar
				Peningkatan bea siswa bagi pelajar dan mahasiswa
	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	Peningkatan kualitas kesehatan	Peningkatan layanan dasar kesehatan masyarakat
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)		Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta fasilitas pendukungnya
				Peningkatan kualitas tenaga kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Pengembangan lingkungan sehat
				Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Misi 4

Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan ketahanan pangan yang handal	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Peningkatan produksi pangan	Peningkatan produktifitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan
	Meningkatkan distribusi pangan	Pencapaian skor pola pangan harapan		Pemenuhan air baku irigasi
				Pengembangan teknologi dan mekanisasi pertanian
				Pengembangan kualitas petani

Misi 5

Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing	Meningkatkan daya saing daerah	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	Peningkatan produksi pertumbuhan ekonomi bidang agribisnis, agro industri, pariwisata, perdagangan dan jasa	Pengembangan produksi bidang agribisnis dan agro industri
		NTP		Penetapan dan pengembangan potensi wisata
		Peningkatan Jumlah WUB yang kompetitif		Peningkatan akses pariwisata beserta fasilitas pendukungnya
	Meningkatkan kerjasama perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang tertangani		Peningkatan kerjasama investasi

Misi 6

Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Penanggulang an kemiskinan melalui pembangunan desa dan kelurahan	Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan	Status Desa	Pengembangan ekonomi kerakyatan	Peningkatan iklim investasi
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan		Peningkatan stimulan UMKM
		Persentase kemiskinan		Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan
				Penguatan kelembagaan koperasi dan BUMDES

Misi 7

Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memantapkan infrastruktur daerah	Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/Mantap	Peningkatan infrastruktur daerah dan pengelolaan lingkungan serta penataan ruang dan perumahan dan permukiman	Peningkatan infrastruktur dasar
		luas area daerah irigasi, daerah irigasi rawa (Ha)		
		Persentase pemukiman yang tertata		Meningkatkan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana
		Jumlah SPAM yang dikelola masyarakat		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Jumlah bangunan/gedung terbangun		Peningkatan pengelolaan lingkungan
		Penurunan angka kecelakaan darat dan perairan		Penataan ruang daerah
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman	Pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya (%)		
		Luas lahan milik pemerintah yang telah bersertifikat		
Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan	Prosentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan risiko bencana		Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak
		Rata-rata waktu respon kejadian bencana		
		Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana		
		Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana		
		Terjaganya kawasan rawan kebakaran hutan		



Misi 8**Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi PAD	Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi	Peningkatan PAD	Peningkatan pendapatan daerah	Optimalisasi pendapatan daerah
			Peningkatan potensi sumber-sumber PAD	Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber-sumber PAD

Misi 9**Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Predikat Akuntabilitas (LKIP)	Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas	Pelayanan publik yang prima dan penyederhanaan sistem birokrasi
				Penerapan standar, operasional dan pelaksanaan
				Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur

Misi 10**Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan layanan publik berbasis teknologi komunikasi dan informatika	Penyediaan layanan internet pada kantor pemerintahan termasuk kelurahan dan desa
				Penyediaan hotspot pada tempat pelayanan publik
				Penyebarluasan informasi

Misi 11

Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat panajam paser utara yang maju, modern dan religius

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaan	Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Kasus/konflik yang bernuansa agama	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi	1. Peningkatan keamanan dan ketertiban guna mendukung pelaksanaan beribadah 2. Optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang ada dan berkembang di masyarakat
Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan	Penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		

D**Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah**

**Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kabupaten Panajam Paser Utara**

Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran

Kebijakan Umum		Program Pembangunan	
1	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian ekonomi.	1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
2	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat kecil menengah.	2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha.
3	Pengembangan industri pengolahan produk lokal daerah.	3	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
4	Perluasan dan penyediaan lapangan kerja.	4	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
5	Meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dengan mendorong pertumbuhan sektor industri, jasa, perdagangan dan penguatan UMKM Meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan serta harmonisasi hubungan industrial.	5	Peningkatan Kesempatan Kerja.

Misi 2: Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu

Kebijakan Umum		Program Pembangunan	
1	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas daerah.	1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
		2	Program Penataan Struktur Industri.
		3	Program Penataan Kawasan Strategis.
		4	Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar.
		5	Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Misi 3 : Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan

Kebijakan Umum		Program Pembangunan	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Pembangunan ruang kelas belajar (RKB) beserta fasilitas pendukungnya. Peningkatan akses pendidikan usia dini (PAUD). Peningkatan kualitas tenaga pengajar. Peningkatan bea siswa bagi pelajar dan mahasiswa. Peningkatan layanan dasar kesehatan masyarakat. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta fasilitas pendukungnya. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan. Pengembangan lingkungan sehat. Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini.
		2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
		3	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh.
		4	Program Pendidikan Non Formal.
		5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
		6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
		7	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
		8	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan.
		9	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD.
		10	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
		11	Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
		12	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
		13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
		14	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
		15	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
		16	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
		17	Program Pembinaan dan Perasyarakatan Olahraga.
		18	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
		19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.
		20	Program Keluarga Berencana.
		21	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
		22	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
		23	Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak, melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat.
		24	Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Misi 4: Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas luas

Kebijakan Umum		Program Pembangunan	
1 Peningkatan produktifitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. 2 Pemenuhan air baku irigasi. 3 Pengembangan teknologi dan mekanisasi pertanian. 4 Pengembangan kualitas petani.		1	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.
		2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
		3	Program Peningkatan Produksi.
		4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
		5	Program Pembangunan Usaha Perkebunan.
		6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
		7	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.
		8	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
		9	Program Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
		10	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
		11	Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
		12	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.
		13	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
		14	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan.
		15	Program Pembangunan Taman Laut Penajam.
		16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.

Misi 5: Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan

Sasaran		Program Pembangunan	
1 Pengembangan produksi bidang agribisnis dan agro industri. 2 Penetapan dan pengembangan potensi wisata. 3 Peningkatan akses pariwisata beserta fasilitas pendukungnya 4 Peningkatan kerjasama investasi.		1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
		2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
		3	Program Pengembangan kemitraan pariwisata.
		4	Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
		5	Program Pengembangan Nilai Budaya.
		6	Program peningkatan kesejahteraan petani.
		7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
		8	Program Produksi Hasi Peternakan.
		9	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan/Peternakan Lapangan.
		10	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
		11	Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan.
		12	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
		13	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.



Sasaran		Program Pembangunan	
		14	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
		15	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
		16	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah.
		17	Program Pengembangan Logistik Hasil Perikanan.
		18	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
		19	Program Pengembangan Pengolahan, Diverifikasi Usaha dan Bina Mutu Produk.
		20	Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan.
Misi 6: Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan			
Sasaran		Program Pembangunan	
1	Peningkatan iklim investasi.	1	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan.
2	Peningkatan stimulan UMKM.	2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
3	Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan.	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
4	Penguatan kelembagaan koperasi dan BUMDES.	4	Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial.
		5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
		6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
		7	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
		8	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.
		9	Program Pro-PPK-PPU.
		10	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
		11	Program Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Pedesaan.
		12	Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
Misi 7: Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman			
Sasaran		Program Pembangunan	
1	Peningkatan infrastruktur dasar.	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2	Meningkatkan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana.	2	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
		3	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3	Peningkatan pengelolaan lingkungan.		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
		4	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
4	Penataan ruang daerah.	5	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
5	Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak.	6	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
		7	Program pengendalian banjir



Sasaran		Program Pembangunan	
		8	Program penyediaan dan pengolahan air baku
		9	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
		10	Program Lingkungan Sehat Perumahan
		11	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		12	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
		13	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
		14	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
		15	Program pengelolaan areal pemakaman
		16	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
		17	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
		18	Program Pengembangan Perumahan
		19	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
		20	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
		21	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
		22	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
		23	Program peningkatan pelayanan angkutan
		24	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
		25	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
		26	Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air
		27	Program penanaman pohon pada lahan diluar kawasan
		28	Program Pembangunan Kawasan mangrove sebagai pusat restorasi
		29	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		30	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		31	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
		32	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		33	Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah
		34	Program perencanaan dan pengembangan Hutan
		35	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
		36	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		37	Program Perencanaan Tata Ruang
		38	Program Pemanfaatan Ruang
		39	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah



Sasaran		Program Pembangunan	
		40	Program Pengendalain Pemanfaatan Ruang
		41	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan (peningkatan kasus tanah yang terselesaikan)
		42	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		43	Program Penataan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		44	Pogram Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan (terselesaikannya konflik-konflik pertanahan)
		45	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
		46	Program Penanggulangan Kebakaran
		47	Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan
		48	Program Perlindugnan dan Konservasi Sumberdaya Hutan
		49	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
		50	Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana
		51	Program Pengendalian Penanganan Bencana
		52	Program Rekonstruksi Infrastruktur Sosial Ekonomi di Wilayah Pasca Bencana
		53	Program Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
		54	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong
		55	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
		56	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Misi 8: Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas			
Sasaran		Program Pembangunan	
1	Optimalisasi pendapatan daerah Intensiikasi dan ekstensifikasi potensi sumber-sumber PAD.	1	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
Misi 9: Memperkuat kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas			
Sasaran		Program Pembangunan	
1	Pelayanan publik yang prima dan penyederhanaan sistem birokrasi.	1	Program Pengembangan Data/Informasi.
		2	Program Penataan Administrasi kependudukan.
		3	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
2	Penerapan standar, operasional dan pelaksanaan.	4	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
		5	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.



Sasaran		Program Pembangunan	
3	Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur.	6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
		7	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
		8	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
		9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
		10	Program Pengendalian Pembangunan Daerah.
		11	Program Kerjasama Pembangunan.
		12	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
		13	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
		14	Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian.
		15	Program Penanganan Bidang hukum.
		16	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
		17	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
Misi 10: Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah			
Sasaran		Program Pembangunan	
1	Penyediaan layanan internet pada kantor pemerintahan termasuk kelurahan dan desa.	1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
		2	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.
		3	Program Sistem Data Gender dan Anak.
		4	Program Keluarga Berencana.
2	Penyediaan hotspot pada tempat pelayanan publik.	5	Program sistem PBDKI (Basis Data Keluarga Indonesia).
		6	Program sistem Pelaporan SR F/I/DALL dan F/ II/ KB.
3	Penyebarluasan informasi.	7	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
		8	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
		9	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
Misi 11: Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius			
Sasaran		Program Pembangunan	
1	Peningkatan keamanan dan ketertiban guna mendukung pelaksanaan beribadah.	1	Program Pembinaan Keagamaan
		2	Program Peringatan Hari-hari Besar/Daerah/Lomba
		3	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
		4	Program ketahanan sosial dan ekonomi
2	Optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang ada dan berkembang di masyarakat.	5	Program pendidikan politik masyarakat
		6	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
		7	Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak criminal
		8	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan



Di Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menetapkan 19 (sembilan belas) sasaran dengan 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program yang akan dicapai dengan memanfaatkan Anggaran Belanja dan Pendapatan (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021.

Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja yang akan dicapai di tahun 2021 sebagai berikut :

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,13 ± 1	%
2	Pengurangan Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,825	%
3	Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri	Nilai investasi	101.584.950.000	Rupiah
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	14,92	Tahun
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	10,79	Tahun
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,75	Tahun
5	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh Dalam Berbagai <i>Event</i> Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	3	Medali
6	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	72,82	%
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	640	Skor
7	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	12	%
8	Meningkatkan Distribusi Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	90,04	Skor
9	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	80.501	Orang
		NTP	104	Indeks
		Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif	137	WUB
10	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani	500	Perizinan

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	
11	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Status Desa	Mandiri = 0 Maju = 8 Berkembang = 22 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Desa
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	24 kelurahan dan 30 desa	%
			86	
		Persentase kemiskinan	7,05	%
12	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap	181	Km
		Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa (Ha)	35,990	Ha
		Persentase Pemukiman yang Tertata	99,80	%
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dikelola Masyarakat	200	SPAM
		Jumlah Bangunan/ Gedung Terbangun	3	Unit
		Penurunan Angka Kecelakaan Darat dan Perairan	9	Kejadian
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,50	Indeks
13	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya (%)	91	%
		Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat	20	Ha
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan	Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	75	%
		Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	< 12	Jam
		Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca bencana	77	%
		Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	150	Ha
15	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi	Peningkatan PAD	286.105.533.454	Rupiah
16	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKJIP)	B	
17	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	50	Aplikasi
18	Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama	0	Kasus
19	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	87	%



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengemban tugas dan amanah masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021.

Pada Bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta beberapa langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
$x > 85$	Sangat Berhasil
$75 < x \leq 85$	Berhasil
$55 < x \leq 75$	Cukup Berhasil
$x \leq 55$	Kurang Berhasil

A

Capaian Kinerja Organisasi

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengemban amanah masyarakat, secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023.

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 sebanyak 19 sasaran dengan 36 indikator kinerja. Dari 36 indikator kinerja, sebanyak 23 indikator atau 69,70% dalam kriteria **Sangat Berhasil**, 3 indikator kinerja atau 9,09% masuk dalam kriteria

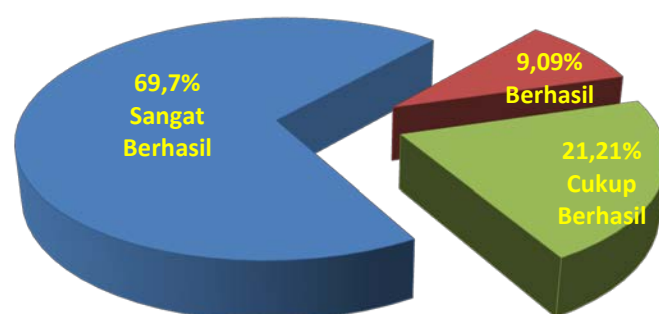
Cukup Berhasil, dan 7 indikator kinerja atau 21,21% masuk dalam kriteria **Kurang Berhasil**, serta 3 indikator kinerja tidak dapat ditampilkan hasil capaiannya.

Selengkapnya capaian indikator kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,13 ± 1 %	-1,69	-53,99
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,825 %	2,95	95,76
3	Nilai Investasi	101.584.950.000 Rupiah	428.286.880.000	421,60
4	Rata-Rata Lama Sekolah	14,92 Tahun	8,36	56,03
5	Harapan Lama Sekolah	10,79 Tahun	12,57	116,50
6	Angka Harapan Hidup	71,75 Tahun	71,68	99,90
7	Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	3 Medali	-	-
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,82 %	49,75	68,32
9	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	640 Skor	565	88,28
10	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB	12 %	22,89	190,77
11	Pencapaian Skor pola pangan harapan	90,04 Skor	83,80	93,07
12	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	80.501 Orang	105.019	130,46
13	NTP	104 Indeks	-	-
14	Peningkatan Jumlah WUB yang kompetitif	137 WUB	191	139,42
15	Peningkatan Jumlah Perizinan yang tertangani	500 Perizinan	1.125	225

Grafik III.1 Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2021



No	Indikator Kinerja	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
16	Status Desa	Mandiri = 0 Maju = 8 Berkembang = 22 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Desa Mandiri = 5 Maju = 14 Berkembang = 11 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	500
17	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	24 kelurahan dan 30 desa 86	Kelurahan, Desa 51,26	59,60
18	Persentase kemiskinan	7,05	%	7,61
19	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap	181	Km	48,15
20	Luas area daerah irigasi, daerah irigasi rawa	35,990	Ha	18,489
21	Persentase pemukiman yang tertata	99,80	%	99,75
22	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola masyarakat	200	SPAM	4
23	Jumlah bangunan/ gedung terbangun	3	Unit	4
24	Penurunan angka kecelakaan darat dan perairan	9	Kejadian	52
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,50	Indeks	69,47
26	Pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	91	%	98,65
27	Luas lahan milik pemerintah yang telah bersertifikat	20	Ha	32,47
28	Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	75	%	70
29	Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	< 12	Jam	< 6
30	Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca bencana	77	%	34
31	Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	150	Ha	198,84
32	Peningkatan PAD	286.105.533.454 Rupiah	49.835.927.455	17,42
33	Predikat Akuntabilitas (LKjIP)	B	-	-
34	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi	50	Aplikasi	48
35	Kasus/ konflik yang bernuansa agama	0	Kasus	0
36	Penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	87	%	100



SASARAN 1**Meningkatkan Perekonomian Masyarakat**

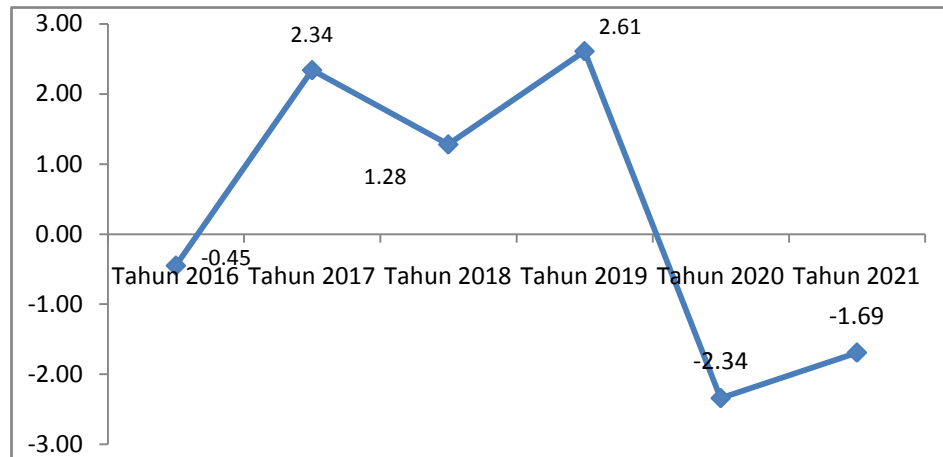
No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-2,34 %	3,13±1	-1,69	-53,99	3,13±1	-53,99
Rata-rata Capaian Kinerja					-53,99		-53,99

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan di dalamnya terdapat kemungkinan terjadi penurunan atau kenaikan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Perekonomian Penajam Paser Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar minus 1,69 persen dari Tahun 2020. Lima lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Penajam Paser Utara yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan dengan peranan sebesar 23,51 persen; Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan peranan sebesar 22,89 persen; Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 16,21 persen; Lapangan Usaha Konstruksi dengan peranan sebesar 14,28 persen; dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 9,06 persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016 - 2021



Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”, yaitu :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
4. Program Pengembangan UMKM;
5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
7. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

SASARAN 2

Pengurangan Angka Pengangguran

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,22 %	2,825	2,95	95,76	2,75	93,22
Rata-rata Capaian Kinerja					95,76		93,22

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran dapat disebabkan oleh minimnya kualitas, baik dari sisi pendidikan maupun keterampilan kelompok angkatan kerja, serta masalah ketenagakerjaan yang dapat memicu pengangguran. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Penduduk usia kerja cenderung mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk di Penajam Paser Utara. Penduduk usia kerja tahun 2021 sebanyak 119.864 orang, bertambah sebanyak 1.080 orang dari Tahun 2020. Penduduk usia kerja yang merupakan angkatan kerja yaitu 66,85 persen (80.130 orang), sisanya 39.734 orang merupakan bukan angkatan kerja.

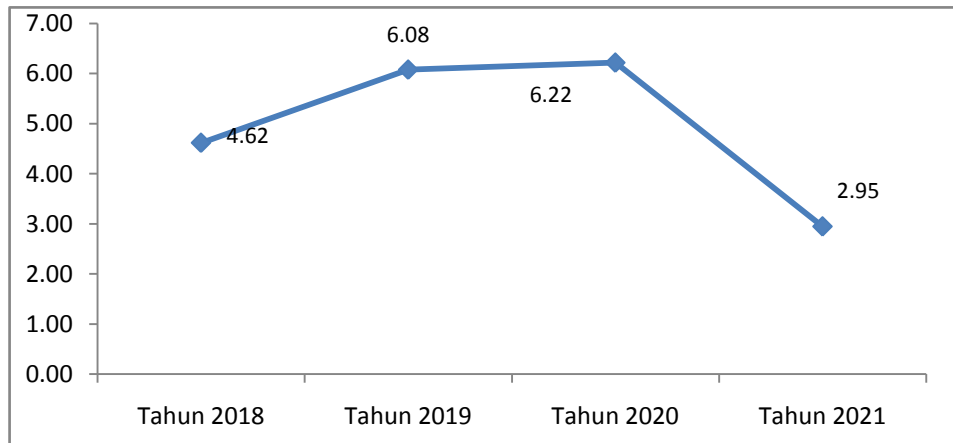
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja, yang mengindikasikan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Dari jumlah tersebut diperoleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2021 sebesar 66,85 persen, turun 2,19 persen poin dibanding Tahun 2020.

Angkatan kerja di Penajam Paser Utara pada Tahun 2021 yang bekerja sebanyak 77.765 orang, dan sebanyak 2.365 orang pengangguran. Terjadi penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 1.876 orang jika dibandingkan Tahun 2020. Jumlah penduduk bekerja mengalami kenaikan sebanyak 863 orang dan jumlah pengangguran menurun sebanyak 2.739 orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Penajam Paser Utara pada Tahun 2021 sebesar 2,95 persen, yaitu TPT Laki-laki sebesar 3,50 persen dan TPT Perempuan sebesar 1,57 persen.



Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018 - 2021



Pendidikan dan Pelatihan untuk tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan.

Dalam rangka penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan beberapa upaya, sebagai berikut:

- Mengadakan pelatihan-pelatihan;
- Menyebarkan informasi bursa tenaga kerja
- Sosialisasi penempatan tenaga kerja lokal

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Pengurangan Angka Pengangguran”, yaitu :

- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- Program Penempatan Tenaga Kerja;
- Program Hubungan Industrial.

SASARAN 3

Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Investasi	571.576.200.000 Rupiah	101.584.950.000	428.286.880.000	421,60	450.233.867.774	587,71
Rata-rata Capaian Kinerja					421,60		587,71

Nilai Investasi

Nilai Investasi Tahun 2018 - 2021

Tahun	Nilai Investasi		Jumlah Investasi (Rp)
	PMA (Rp)	PMDN (Rp)	
Tahun 2018	13.884.277.863,57	315.473.800.000	329.358.077.864
Tahun 2019	66.963.000.000	1.007.135.600.000	1.074.098.600.000
Tahun 2020	84.528.000.000	487.048.200.000	571.576.200.000
Tahun 2021	23.400.880.000	404.886.000.000	428.286.880.000

Nilai Investasi di Tahun 2021 mengalami penurunan, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Realisasi Investasi PMA pada tahun 2021 sebesar Rp 23.400.880.000,00,- , nilai ini mengalami penurunan pencapaian dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 84.528.020.000,00,- , dan nilai investasi PMDN Tahun 2021 sebesar Rp 404.886.000.000,- nilai ini menunjukkan berkurangnya nilai investasi dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp 487.048.200.000,00,-. Berkurangnya pencapaian di Tahun 2021 apabila dibandingkan Tahun 2021 disebabkan oleh melemahnya perekonomian akibat wabah covid-19 yang berimbas pada penurunan nilai investasi.

Jika dijumlah realisasi capaian Nilai Investasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 telah mencapai sebesar Rp 2.646.065.480.000, sehingga persentase capaian Nilai Investasi terhadap target akhir RPJMD (Rp 450.233.867.774) sebesar 587,71 persen, telah melebihi target RPJMD.

Adapun faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- Adanya komitmen pimpinan dan aparatur DPMPTSP untuk mencapai Target kinerja;
- Rencana kegiatan telah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan target kinerja;
- Berjalannya pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri”, yaitu:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;



2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

SASARAN 4

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rata-rata lama sekolah	8,28 Tahun	14,92	8,36	56,03	15,07	55,47
2	Harapan Lama Sekolah	12,56 Tahun	10,79	12,57	116,50	10,96	114,69
3	Angka Harapan Hidup	71,41 Tahun	71,75	71,68	99,90	72,50	98,87
Rata-rata Capaian Kinerja					90,81		89,68

1. Rata-rata Lama Sekolah

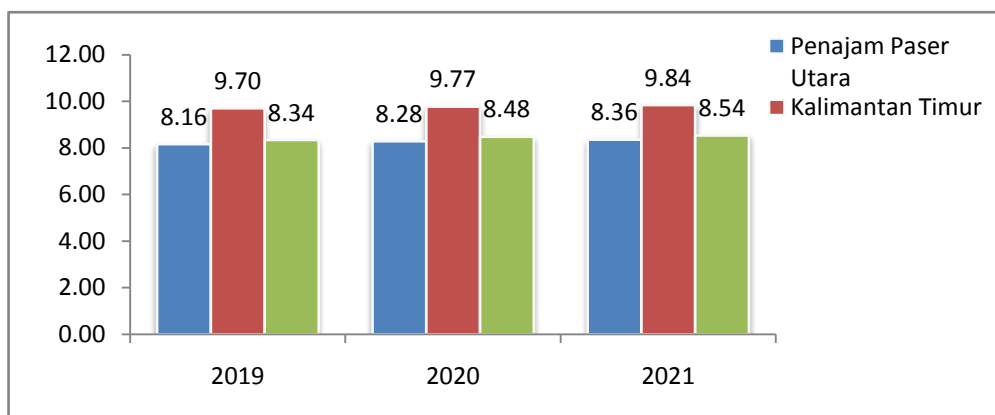
Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Dalam perhitungan rata-rata lama sekolah, penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Pada Tahun 2021, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 8,36 tahun masih kurang dari target yang diperjanjikan, dengan capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 56,03 persen. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara masih lebih rendah dibandingkan dengan Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia (8,54 tahun) dan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur (9,84 tahun).

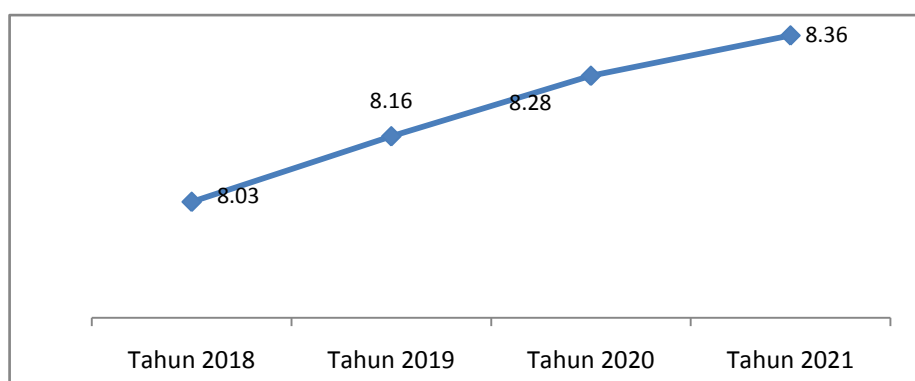
Upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mendorong meningkatnya Rata-rata Lama sekolah adalah antara lain dengan memberikan

bantuan peralatan sekolah bagi siswa, bea siswa bagi siswa berprestasi, kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah negeri melalui program wajib belajar sembilan tahun untuk mendorong warga Kabupaten Penajam Paser Utara yang berusia sekolah untuk bersekolah agar minimal dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Rata-rata Lama Sekolah Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim, Indonesia Tahun 2019 - 2021



Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018 - 2021



2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah didapatkan dengan menghitung rata-rata jumlah penduduk yang bersekolah pada rentang umur tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada rentang umur tertentu.

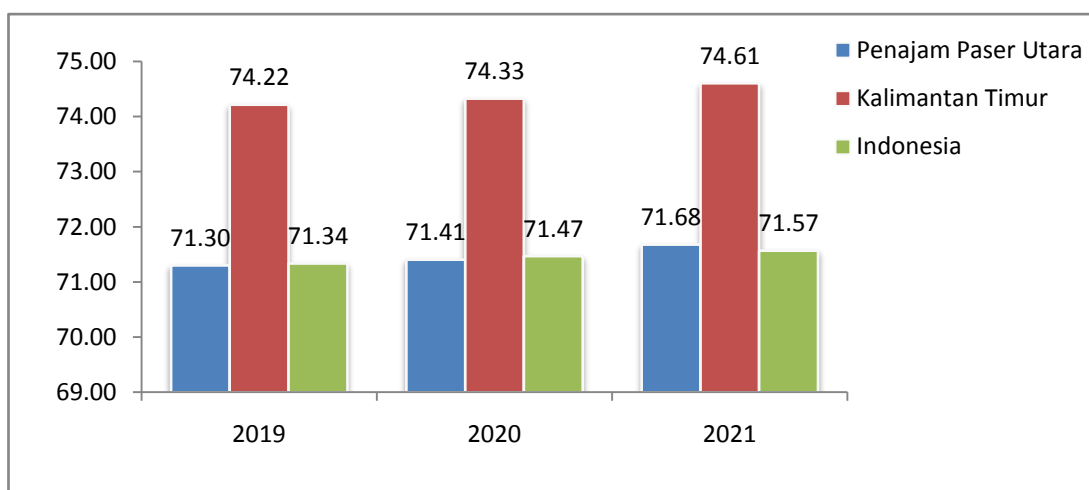
Pada tahun 2021, Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 12,57 tahun dari target yang ditetapkan 10,79 tahun dengan capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 116,50 persen.



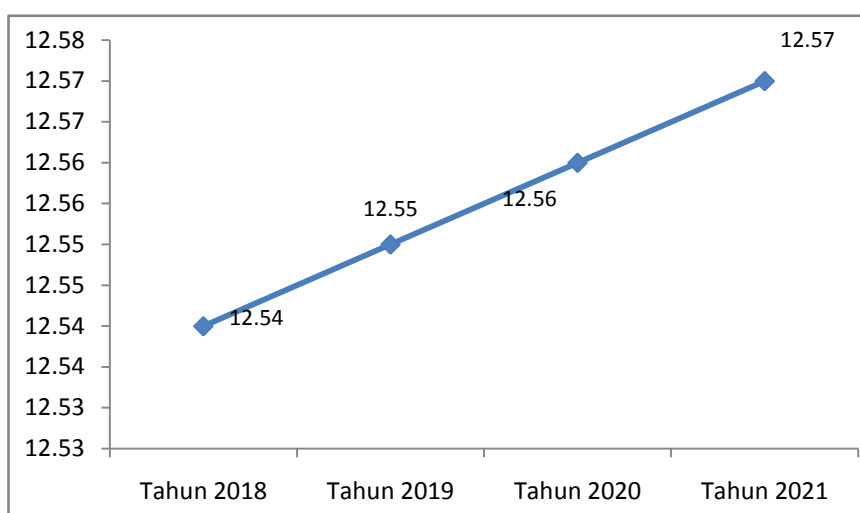
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara lebih rendah dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah pada Provinsi Kalimantan Timur dan Angka Harapan Lama Sekolah Indonesia. Angka Harapan Lama Sekolah Indonesia tahun 2021 sebesar 13,08 tahun dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 13,81 tahun.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui sosialisasi pendidikan dari tingkat PAUD, memberikan bantuan peralatan pendukung sekolah bagi siswa, beasiswa bagi siswa berprestasi, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana jenjang SD dan SMP.

Harapan Lama Sekolah Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim, Indonesia Tahun 2019 - 2021



Harapan Lama Sekolah Tahun 2018 - 2021



3. Angka Harapan Hidup

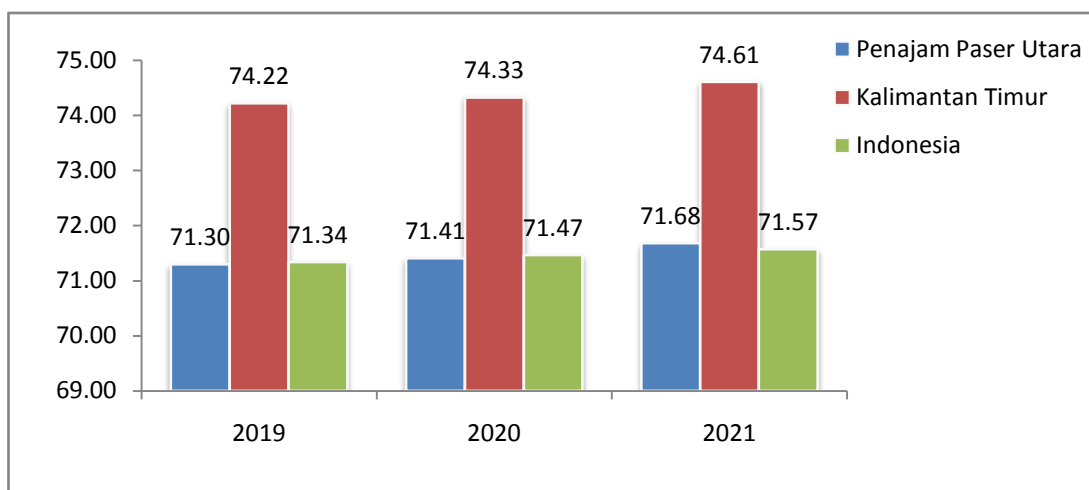
Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang. AHH menjadi suatu indikator derajat kesehatan yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program-program kesehatan. Faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup yaitu : faktor sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021 sebesar 71,68 tahun, mengalami kenaikan 0,27 tahun dari tahun 2020. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara selalu meningkat beberapa tahun terakhir.

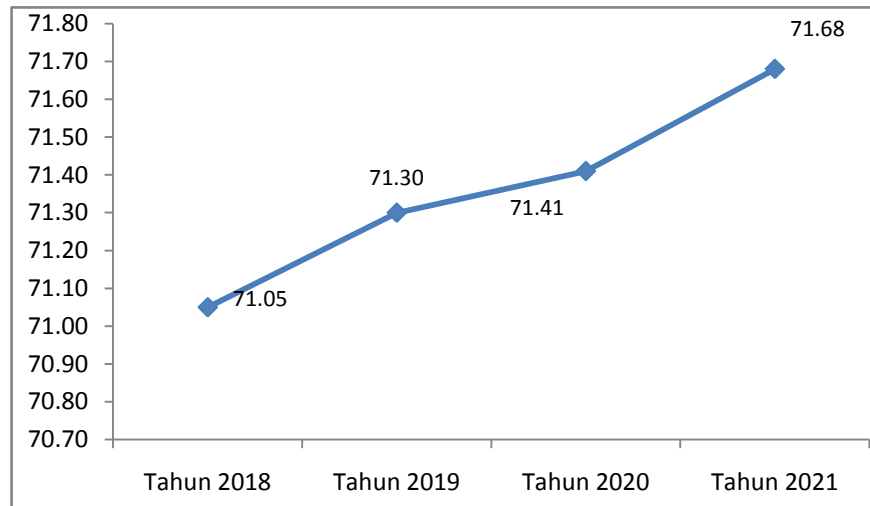
Pengukuran Angka Harapan Hidup ini bersumber dari data BPS tahun 2021. Dari target yang ditetapkan sebesar 71,75 tahun, Angka Harapan Hidup pada tahun 2021 sebesar 71,68 tahun dengan capaian kinerja sebesar 99,90%.

Angka AHH ini masih berada di bawah capaian AHH di Provinsi Kalimantan Timur 74,61 tahun dan berada di atas capaian AHH Indonesia sebesar 71,57 tahun, tingginya AHH merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan nasional terutama di bidang kesehatan.

Angka Harapan Hidup Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim, Indonesia Tahun 2019 - 2021



Angka Harapan Hidup Tahun 2018 - 2021



Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan”, yaitu :

1. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
2. Program Pengelolaan Pendidikan;
3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
5. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

SASARAN 5

Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Medali yang diperoleh dalam berbagai event olahraga tingkat provinsi dan Nasional	- Medali	3	-	-	3	-
Rata-rata Capaian Kinerja					-		-

Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai *Event* Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional

Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai *Event* Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2021 tidak dapat terealisasi sesuai yang ditargetkan karena tidak adanya *event* olahraga tingkat provinsi maupun tingkat nasional akibat adanya pandemi covid-19.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda”, yaitu :

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

SASARAN 6

Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50,02 %	72,82	49,75	68,32	79,70	62,42
2	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	- Skor	640	565	88,28	660	85,61
Rata-rata Capaian Kinerja					78,30		74,02

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Variabel yang digunakan dalam pengukuran pemberdayaan gender (*gender empowerment*) adalah:

1. Peran perempuan di bidang pengambilan keputusan politik diukur dengan keanggotaan DPR dan DPRD.

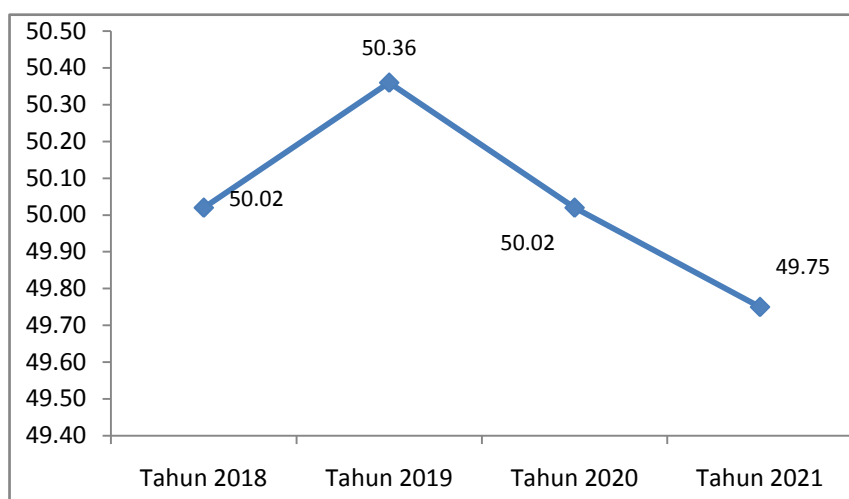
2. Peran perempuan di bidang ekonomi diukur seberapa banyak perempuan yang bekerja sebagai pekerja profesional, kepemimpinan, teknisi dan ketatalaksanaan atau pekerja terampil.
3. Penguasaan sumber daya ekonomi yaitu perkiraan penghasilan perempuan dan laki-laki.



IDG Kabupaten Penajam Paser

Utara pada Tahun 2021 berada pada angka 49,75 persen. Angka ini belum mencapai target 72,82 persen yang diperjanjikan, dengan capaian kinerja sebesar 68,32 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan IDG tahun 2020 yaitu sebesar 50,02 persen atau menurun 0,27 persen. Penurunan ini dikarenakan kuota kursi parlemen di DPRD Kabupaten belum mencapai 30% (hanya 4 %), dan jumlah tenaga profesional di pemerintahan yang menjabat eselon II sebanyak 15%.

Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2018 - 2021



2. Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh



dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

**Kategori Penghargaan Kabupaten/ Kota Layak Anak
Berdasarkan Skor**

No	Skor	Kategori
1	901- 1000	Kabupaten/ Kota Layak Anak
2	801 – 900	Utama
3	701 – 800	Nindya
4	601 – 700	Madya
5	501 - 600	Pratama

Pada Tahun 2020 evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tidak dilaksanakan karena adanya Pandemi Covid-19. Tahun 2021 Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) Kategori Pratama dengan point 565. Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) dari tahun 2019 skor 545 meningkat di tahun 2021 skor 565 sebesar 20 point. Diharapkan dengan meningkatnya peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Ramah Anak, serta Forum Anak di Kabupaten Penajam Paser Utara, kategori penghargaan kabupaten layak anak dapat meningkat.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”, yaitu :

1. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
5. Program Perlindungan Khusus Anak.



SASARAN 7

Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian (dalam arti luas)

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2020		2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 Terhadap RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	21,96	%	12	22,89	190,75	13	176,08
Rata-rata Capaian Kinerja						190,75		176,08

Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Nilai PDRB suatu wilayah dapat memberikan informasi tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran masyarakat terhadap wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya juga tinggi atau tingkat kemakmuran masyarakatnya juga baik.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap Kontribusi sektor pertanian dan Perikanan terhadap PDRB Atas Harga Dasar Harga Berlaku Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Lapangan Usaha pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Lima lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Penajam Paser Utara yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dengan peranan sebesar 23,51 persen; Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan peranan sebesar 22,89 persen; Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 16,21 persen; Lapangan Usaha Konstruksi dengan peranan sebesar 14,28 persen; dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 9,06 persen.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian”, yaitu :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
5. Program Perizinan Usaha Pertanian;
6. Program Penyuluhan Pertanian;
7. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
9. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
10. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

SASARAN 8

Meningkatkan Distribusi Pangan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2020		2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 Terhadap RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	91,00	Skor	90,04	83,80	93,07	94,84	88,36
Rata-rata Capaian Kinerja						93,07		88,36

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Dengan kata lain, PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang.

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, pengembangan keanekaragaman pangan dari sisi konsumsi masyarakat Penajam Paser Utara mengalami penurunan. Hal itu antara lain tercermin dari menurunnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Penajam Paser Utara dari 91,00 pada tahun 2020 menjadi 83,80 pada tahun 2021 dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.074 Kkal/Kapita per hari. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan ini di bawah skor Pola Pangan Harapan nasional 90,1.

Adapun hal-hal yang menjadi penyebab tidak tercapaainya skor Pola Pangan Harapan Penajam Paser Utara, yaitu:

1. Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terbatasnya aktivitas masyarakat di luar rumah karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
2. Menurunnya daya beli masyarakat.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pangan dan gizi serta pola konsumsi Beragam Bergizi Seimbang (B2SA).
4. Kecenderungan masyarakat mengonsumsi makanan siap saji.



Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian skor Pola Pangan, yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.150 Kkal/Kapita per hari.
2. Penerapan pola konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang (B2SA) melalui kompetisi serta penerapan di tingkat rumah tangga.
3. Penerapan pola konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang (B2SA) berbasis sumber daya lokal.
4. Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya pangan lokal sehingga terpenuhinya karbohidrat yang bersumber dari pangan non beras.



5. Meningkatkan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) secara luas di tingkat kelompok masyarakat yang dapat meningkatkan konsumsi sayur, buah, dan aneka pangan lokal.
6. Mengadakan sosialisasi konsumsi pangan dan gizi seimbang.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya Distribusi Pangan”, yaitu :

1. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
2. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
4. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

SASARAN 9

Meningkatkan Daya Saing Daerah

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	14.371 Orang	80.501	105.019	130,46	407.937	44,67
2	NTP	- Indeks	104	-	-	105	-
3	Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif	60 WUB	137	191	139,42	300	63,67
Rata-rata Capaian Kinerja					134,94		54,17

1. Tingkat Kunjungan Wisata

Banyaknya tingkat kunjungan wisata memberikan dampak positif bagi suatu daerah dan masyarakat lokal. Beberapa dampak positifnya yaitu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat lokal.

Objek wisata Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh pantai. Beberapa pantai yang terkenal diantaranya adalah Pantai Nipah-Nipah, Pantai Saloloang, Pantai Pejala, dan Pantai Corong. Selain pantai, terdapat wisata mangrove di daerah pesisir yang ditumbuhi tanaman bakau, seperti Ekowisata Hutan Mangrove Kampung Baru, serta terdapat wisata fauna, penangkaran rusa di Api-Api.

Kunjungan Wisatawan pada Tahun 2021 Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 105.019 wisatawan, meningkat dari tahun sebelumnya 14.371 wisatawan (meningkat sebesar 730,77%). Target Kunjungan Wisatawan Tahun 2021 sebesar 80.501 maka target 2021 tercapai sebesar 130,46 persen. Kunjungan Wisata di Penajam Paser Utara meningkat drastis Tahun 2021 akibat dari menurunnya tingkat pandemi dan adanya objek wisata baru.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Tingkat Kunjungan Wisata yaitu dengan peningkatan dan pengembangan objek wisata lama atau objek wisata baru dan memaksimalkan promosi objek wisata.

2. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani.

Nilai Tukar Petani Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 tidak dapat ditampilkan karena tidak adanya kegiatan penghitungan terhadap Nilai Tukar Petani dari sejak Tahun 2019. Tetapi, jika melihat data Nilai Tukar Petani beberapa tahun sebelumnya, Nilai Tukar Petani Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2017 sebesar 108,92 dan biasanya berada di atas Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur. Nilai Tukar Petani Kalimantan Timur Tahun 2019 sebesar 94,8 dan Tahun 2020 sebesar 114,97.

NTP lebih besar dari 100, berarti petani mengalami peningkatan dalam hal perdagangan. Kondisi tersebut terjadi ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami



penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar.

3. Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif

Wirausaha Baru (WUB) adalah orang yang telah terseleksi sebagai peserta program pencetakan Wirausaha Baru.

Peningkatan Jumlah WUB bertujuan untuk :

- a. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja;
- b. Memeratakan distribusi pendapatan masyarakat;
- c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tahun 2021 terdapat 191 WUB di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat penambahan WUB dari Tahun 2020 sebanyak 60 WUB. Indikator kinerja ini tercapai melebihi dari target 137 WUB yang ditargetkan, sehingga capaian kinerja sebesar 139,42 persen.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan WUB yaitu dengan mengadakan kerjasama bersama pemerintah provinsi melalui pelatihan, dan bimbingan teknis peningkatan kualitas bagi pelaku usaha.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Daya Saing Daerah”, yaitu :

1. Program Pemasaran Pariwisata;
2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
5. Program Pengembangan Kebudayaan;
6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;



8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
9. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
10. Program Penyuluhan Pertanian;
11. Program Perizinan Usaha Pertanian;
12. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
13. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
14. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
15. Program Pengembangan UMKM.

SASARAN 10

Meningkatkan Kerjasama Perekonomian

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani	937 Perizinan	500	1.125	225	2.500	126,16
Rata-rata Capaian Kinerja					225		126,16

Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani

Jumlah Perizinan yang tertangani di tahun 2020 mencapai 937 izin, dan di Tahun 2021 sebanyak 1.125 izin. Capaian kinerja Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani Tahun 2021 sebesar 225 persen dari yang ditargetkan 450 perizinan tercapai 1.125 izin. Capaian kinerja Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani juga telah melebihi dari yang ditargetkan di akhir RPJMD. Jumlah Perizinan yang Tertangani dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 3.154 izin.

Peningkatan jumlah perizinan yang tertangani di Tahun 2021 disebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk pengurusan perizinan. Untuk meningkatkan capaian kinerja ini diupayakan promosi secara maksimal sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi di Penajam Paser Utara.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Kerjasama Perekonomian”, yaitu :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal;
2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Promosi Penanaman Modal.

SASARAN 11

Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Status Desa	Mandiri = 3 Maju = 9 Berkembang = 18 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 0 Maju = 8 Berkembang = 22 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 5 Maju = 14 Berkembang = 11 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	500	Mandiri = 2 Maju = 10 Berkembang = 18 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	250
2	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	16,63 %	86	51,26	59,60	100	51,26
3	Persentase Kemiskinan	7,36 %	7,05	7,61	92,64	6,2	81,47
Rata-rata Capaian Kinerja					217,41		127,58

1. Status Desa

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni:

1. Desa Mandiri

2. Desa Maju
3. Desa Berkembang
4. Desa Tertinggal
5. Desa Sangat Tertinggal

Tahun 2021 Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai tiga (5) Desa Mandiri, yaitu Desa Babulu Darat, Desa Giri Mukti, Desa Sidorejo dan Desa Sukaraja; sembilan (14) Desa Maju; dan delapan belas (11) Desa Berkembang. Pencapaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2020 dimana terdapat penambahan dua (2) Desa Mandiri.

Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh beberapa hal, yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa secara baik dan transparan.
2. Pembinaan secara terus menerus yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pendampingan P3MD.
3. Adanya Program Pro P2KPM yang merekrut para pendamping teknis dalam meningkatkan pembangunan desa dan bantuan keuangan pemerintah daerah untuk pelatihan-pelatihan demi meningkatkan keterampilan masyarakat.

2. Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, dan sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara senantiasa menunjukkan komitmen dalam membangun infrastruktur daerah Penajam Paser Utara dengan mengaplikasikan berbagai ide inovasi sebagai percepatan pembangunan infrastruktur demi



tersedianya pelayanan publik yang memadai. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sejak Tahun 2013 mendirikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum di tingkat kecamatan untuk menyelesaikan kendala infrastruktur di desa dan kelurahan sehingga mempersingkat jalur birokrasi yang panjang.

Tahun 2021 Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan mengalami peningkatan 308,24 persen dari Tahun 2020. Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan tidak tercapai sesuai dengan yang ditargetkan karena keterbatasan anggaran.

3. Persentase Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021 sebesar 12.130 (7,61 persen), sedangkan pada tahun 2020 sebesar 11.930 (7,36 persen). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 0,25 persen penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021.

Persentase Kemiskinan Tahun 2018 - 2021

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2018	448.000	11.760	7,40
2019	466.918	11.520	7,18
2020	488.807	11.930	7,36
2021	513.666	12.130	7,61

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan”, yaitu :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
2. Program Penataan Desa;
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;



5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
7. Program Pengembangan Permukiman;
8. Program Pengembangan Perumahan;
9. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
10. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
11. Program Perekonomian dan Pembangunan.

SASARAN 12

Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap	23,15 Km	181	48,15	26,60	1.206,06	53,92
2	Luas area daerah irigasi, daerah irigasi rawa	28,573 Ha	35,990	18,489	51,37	152,330	34,04
3	Persentase pemukiman yang tertata	99,72 %	99,80	99,75	99,95	99,90	99,85
4	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola masyarakat	8 SPAM	200	4	2	1.310	18,47
5	Jumlah bangunan/ gedung terbangun	0 Unit	3	4	133,33	17	76,47
6	Penurunan angka kecelakaan darat dan perairan	31 Kejadian	9	52	17,31	46	36,51
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,09 Indeks	70,50	69,47	98,54	75,65	91,83
Rata-rata Capaian Kinerja					61,30		58,73

1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap

Jalan Kondisi Baik adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis.

Panjang jalan di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2020 tercatat sepanjang 1.371,53 km, dimana jalan negara sepanjang 58,5 km, jalan provinsi

sepanjang 89 km, dan jalan kabupaten/ kota sepanjang 1.224,03 km. Sebanyak 95,3 persen jalan provinsi di Kabupaten Penajam Paser Utara berada dalam kondisi mantap, dan 4,7 persen dalam kondisi tidak mantap. Sedangkan, 86,33 persen jalan negara memiliki kondisi baik, 8,55 persen sedang, 5,13 persen rusak, dan tidak ada jalan dengan kondisi rusak berat.

Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2021 terealisasi sepanjang 48,15 Km, tercapai 26,60 persen dari yang ditargetkan. Tidak tercapainya indikator kinerja ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang ada.



2. Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa

Tahun 2021 Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa seluas 18,489 Ha. Dari yang ditargetkan 35,990 tercapai sebesar 51,37 persen. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah berupaya membangun jaringan irigasi yang tersebar di wilayah sentra pertanian seperti di Babulu. Jaringan irigasi ini merupakan satu kesatuan sistem pengairan yang terintegrasi yang dibagi berdasarkan saluran primer, sekunder dan tersier. Agar operasi dan pemeliharaan dapat berjalan dengan baik, kegiatan pengelolaan dibagi



berdasarkan kewenangan masing-masing yang terdiri dari pemerintah provinsi untuk saluran primer, pemerintah kabupaten untuk saluran sekunder dan masyarakat melalui Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) mengelola saluran tersier.



3. Persentase Pemukiman yang Tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan.

Berdasarkan RTRW Kab. PPU No. 3 Th 2014 Luas Kawasan Permukiman Perkotaan dan Permukiman Perdesaan adalah Sebesar 13.292 Ha. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menargetkan 99,80 persen untuk indikator Persentase Pemukiman yang Tertata, terealisasi adalah 99,75 persen sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,95 persen.

4. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dikelola Masyarakat

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pengembangan SPAM yang merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, dan syarat kontinuitas.



Pada Tahun 2021 Kabupaten Penajam Paser Utara Mendapatkan Alokasi 4 Desa/Kelurahan yang mendapatkan Program Pamsimas, yaitu:

1. Desa Giri Purwa
2. Desa Babulu Darat



3. Desa Binuang
4. Desa Telemow

Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menargetkan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dikelola Masyarakat sebanyak 200 SPAM dan terealisasi sebanyak 4 SPAM, sehingga capaian kinerja 2 persen.

5. Jumlah Bangunan/ Gedung Terbangun

Infrastruktur memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembangunan terus dilaksanakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Salah satu permasalahan sarana pelayanan pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu belum terpenuhinya ketersediaan bangunan gedung untuk pemerintahan.

Pada Tahun 2021 terdapat pembangunan 4 unit gedung. Indikator ini tercapai melebihi dari yang ditargetkan 3 gedung sehingga realisasi capaian sebesar 133,33 persen.

6. Penurunan Angka Kecelakaan Darat dan Perairan

Tahun 2021 terdapat 52 kejadian kecelakaan darat di Penajam Paser Utara, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi 31 kejadian. Target Angka Kecelakaan Darat dan Perairan 9 kejadian, terealisasi 52 kejadian sehingga capaian kinerjanya sebesar 17,31 persen. Tingginya Angka Kecelakaan Darat atau rendahnya persentase capaian kinerja Angka Kecelakaan Darat pada umumnya disebabkan oleh faktor kelalaian pengguna jalan, faktor kondisi jalan yang kurang baik, faktor kendaraan, dan faktor kondisi alam.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi Angka Kecelakaan Darat, antara lain:

1. Pengaturan lalu lintas jalan.
2. Penyediaan dan pemeliharaan prasarana jalan.
3. Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum.



7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah:

1. Memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah :

1. Indeks Kualitas/ Pencemaran Air
2. Indeks Kualitas/ Pencemaran Udara
3. Indeks Tutupan Hutan/Lahan

Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan target untuk IKLH sebesar 70,50. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 sebesar 69,47, sehingga capaian kinerjanya sebesar 98,54 persen. Jika dibandingkan dengan IKLH Tahun 2020 yaitu 70,09, IKLH Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami penurunan. Penurunan IKLH ini diakibatkan perbedaan titik pemantauan atau titik pengambilan sampel. Titik pemantauan atau titik pengambilan sampel di tahun 2021 terdapat di Sungai Tunan.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan”, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Jalan;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
4. Program Pengembangan Perumahan;
5. Program Kawasan Permukiman;
6. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Program Penataan Bangunan Gedung;



9. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
10. Program Pengelolaan Pelayaran;
11. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
12. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
13. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
14. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
15. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
16. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
17. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).

SASARAN 13

Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya (%)	92,96 %	91	98,65	108,41	92,05	107,17
2	Luas lahan milik pemerintah yang telah bersertifikat	13 Ha	20	32,47	162,35	110	52,25
Rata-rata Capaian Kinerja					135,38		79,71

1. Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Salah satu cakupan penting dalam penataan ruang wilayah adalah penentuan dan penataan ruang terbuka hijau yang diatur di dalam undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah.

Berdasarkan hasil analisa neraca tata ruang yang telah dibuat persentase kesesuaian antara penggunaan lahan aktual dengan Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 98,65 persen. Capaian persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2020 dan melebihi yang ditargetkan sebesar 108,41 persen.

2. Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat

Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat bertambah 19,47 Ha di Tahun 2021 dari Tahun 2020. Target Tahun 2021 seluas 20 Ha terealisasi 32,47 Ha sehingga realisasi capaian kinerja sebesar 162,35 persen.

Jika dihitung jumlah Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 seluas 57,47 Ha, sehingga dengan target akhir RPJMD 110 Ha telah terealisasi sebesar 52,25 persen.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman”, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
3. Program Penataan Bangunan Gedung.



SASARAN 14

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	63,59 %	75	70	93,33	85	82,35
2	Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	< 6 Jam	< 12	< 6	200	< 6	100
3	Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	30,89 %	77	34	44,16	80	42,50
4	Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	185,24	150	198,84	132,56	200	99,42
Rata-rata Capaian Kinerja					117,51		81,07

1. Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana

Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana. Prioritas program pengurangan risiko bencana, yaitu:

1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya;
2. Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah;
3. Terwujudnya penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kapasitas dan budaya aman dari bencana di semua tingkat;
4. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar;
5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat.

Indikator kinerja Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana pada Tahun 2021 terealisasi 70 persen, kurang dari yang ditargetkan 75 persen. Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Tahun 2021 meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2020 yang terealisasi sebesar 63,59 persen.



2. Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana

Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana adalah waktu yang dibutuhkan bagi Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD dari sejak pertama kali menerima informasi kejadian bencana, hingga tiba di lokasi kejadian bencana.

Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana Tahun 2021 ditargetkan tidak lebih dari 12 jam (<12 jam) dapat terealisasi tidak lebih dari 6 jam (<6 jam), sehingga capaian kinerja sebesar 200 persen. Realisasi Kinerja Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu <6 jam telah tercapai 100 persen. Salah satu kendala yang ditemukan dalam respon kejadian bencana adalah jarak tempuh ke lokasi kejadian bencana.

3. Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana

Tahun 2021 Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020. Realisasi Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana Tahun 2021 sebesar 34 persen dengan persentase capaian sebesar 44,16 persen. Rendahnya capaian ini diakibatkan oleh faktor kekurangan anggaran yang ada.



4. Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan

Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan terealisasi seluas 198,84 Ha, dengan realisasi capaian sebesar 132,56 persen, melampaui target yang direncanakan. Hal ini dikarenakan berkurangnya aktivitas masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar untuk lahan pertanian. Selain itu cuaca yang cenderung sering hujan membuat lahan menjadi basah sehingga tidak mudah terbakar. Realisasi capaian kinerja tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya, situasi dimasa pandemi dan pembatasan aktivitas di masyarakat memicu menurunnya jumlah kebakaran hutan dan lahan, sehingga secara tidak langsung berefek terhadap terjaganya kawasan rawan kebakaran. Penyebab keberhasilan dari capaian kinerja ini adalah cara bagaimana memberikan edukasi ke masyarakat untuk tidak membakar hutan/ lahan mereka, selain itu adanya kebijakan pemerintah tentang ancaman bagi pembakar hutan/ lahan membuat para pelaku pembakar lahan berfikir dua kali untuk melakukan aksinya, ditambah beberapa kasus penindakan terhadap pelaku pembakar lahan yang berujung di tahanan Polres Penajam Paser Utara jelas menunjukkan bahwa kebakaran hutan/ lahan bukan hal yang bisa diremehkan.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan kedepannya akan terus meningkatkan kinerja pelayanan ke masyarakat demi menjaga keamanan masyarakat dari bahaya kebakaran dan penyelamatan dari hewan berbahaya dan berbisa. Pada Tahun 2019 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan telah menggagas inovasi sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran mandiri untuk desa sebagai solusi untuk pencegahan dini terjadinya kebakaran di setiap desa/ kelurahan, namun inovasi tersebut terkendala dengan pembiayaan dari desa dan pemerintah daerah, sehingga perlu adanya dukungan dari pengambil kebijakan penganggaran untuk merealisasikannya, sehingga kedepannya desa/kelurahan dapat secara mandiri melakukan pencegahan kebakaran di wilayah mereka masing-masing sebelum Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan datang untuk memberi bantuan dengan armada pemadam kebakaran.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan”, yaitu :

1. Program Penanggulangan Bencana;



2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

SASARAN 15

Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan PAD	88.250.948.814,26 Rp	286.105.533.454	49.835.927.455	17,42	1.364.708.196.224	17,43
Rata-rata Capaian Kinerja					17,42		17,43

Peningkatan PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 adalah Rp 49.835.927.455,00. Jumlah ini menurun sebesar 43,53 persen dibanding PAD tahun 2020 sebesar Rp 88.250.948.814,26. Realisasi PAD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021 belum mencapai target PAD yang ditetapkan sebesar Rp 286.105.533.454,00 atau dengan capaian sebesar 17,42 persen. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan Hasil Pajak Daerah sebesar Rp 23.053.442.694,00, Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 5.700.061.149,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp 2.487.623.483,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 18.594.800.130,00.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi”, yaitu :
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

SASARAN 16**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Predikat Akuntabilitas (LKjIP)	B	B	-	-	B	-
Rata-rata Capaian Kinerja					-		-

Predikat Akuntabilitas (LKjIP)

Predikat Akuntabilitas diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai berfungsinya implementasi dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 memperoleh nilai 60,35 atau predikat “B”. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan hasil yang Baik. Predikat Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 belum diperoleh dari Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan PAN dan RB). Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selalu berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, yaitu :
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

SASARAN 17

Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik yang Berbasis Web

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	48 Aplikasi	50	48	96	68	70,59
Rata-rata Capaian Kinerja					96		70,59

Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi

Paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer-driven government*), hal ini sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas. Prinsip - prinsip pelayanan publik digunakan sebagai upaya peningkatan kualitas di dalam penyediaan pelayanan pada sektor publik termasuk dalam hal ini adalah sebagai dasar pengembangan *e-government*.

Untuk meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah berusaha membuat dan mengembangkan berbagai aplikasi yang menyajikan berbagai data dan informasi yang memberikan kemudahan dalam aksesibilitas.

Tahun 2021 realisasi atas Meningkatkan Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi sebanyak 48 aplikasi. Jumlah ini masih sama jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebanyak 48 aplikasi. Capaian indikator ini belum mencapai yang ditargetkan 50 aplikasi dengan capaian sebesar 96 persen. Optimalisasi atas aplikasi layanan publik yang berbasis Teknologi Informasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu manajemen jaringan, hal tersebut mengakibatkan kurangnya control atas pemakaian serta pemeliharaan aplikasi tersebut. Proses integrasi aplikasi tersebut terkendala dengan adanya Peraturan Presiden no. 95 tahun 2018 tentang System Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web”, yaitu :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Program Aplikasi Informatika.

SASARAN 18

Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama	0 Kasus	0	0	100	0	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100		100

Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama

Cara pandang terhadap agama dengan menempatkan agama sebagai sumber konflik, telah menimbulkan berbagai upaya menafsirkan kembali ajaran agama dan kemudian dicarikan titik temu pada level tertentu, dengan harapan konflik di antara umat beragama akan redam jika antar pemeluk agama saling toleran.

Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021 tidak ditemukan atau tidak ada kasus/ konflik, hal ini dikarenakan tetap terjaganya suasana yang kondusif. Kasus/ konflik bernuansa agama dapat dihindari dengan berbagai upaya, seperti:

1. Melakukan Pembinaan dan koordinasi rutin Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan organisasi keagamaan;
2. Meningkatkan peran organisasi keagamaan;
3. Memperingati hari-hari besar keagamaan;
4. Melaksanakan dialog-dialog lintas umat beragama;
5. Melaksanakan dialog-dialog kebangsaan;

6. Melakukan pembinaan terhadap Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) serta organisasi paguyuban yang ada;
7. Melakukan koordinasi dengan paguyuban-paguyuban dan organisasi sosial budaya lainnya.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama”, yaitu :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

SASARAN 19

Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2021 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	76 %	87	100	114,94	90	111,11
Rata-rata Capaian Kinerja					114,94		111,11

Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Capaian indikator kinerja Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Tahun 2021 terealisasi 100 persen, melebihi dari yang ditargetkan 87 persen. Masih banyaknya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Tahun 2021 dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, yaitu:

1. Secara intens melakukan tindakan penertiban nonyustisi terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda/perkada;
2. Melakukan sosialisasi perda/ perkada secara masif kepada masyarakat;
3. Melakukan pembinaan dan peringatan dalam rangka menekan angka pelanggaran perda/perkada.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya Peraturan Perundang-Undangan”, yaitu :

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Hasil capaian kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2021 secara umum dapat mencapai target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari 19 sasaran yang ditargetkan, tercapai dengan rentang capaian kinerja sasaran bervariasi. Rata-rata nilai capaian kinerja sasaran sebesar 115,81 persen dengan interpretasi “*sangat berhasil*”.

Perolehan rata-rata nilai kinerja tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

**Perolehan Capaian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021**

Tujuan	Sasaran	Rata-rata Capaian Tahun 2021 (%)	Interpretasi
Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan perekonomian masyarakat	-53,99	Kurang Berhasil
Pengurangan angka pengangguran	Mengurangi angka pengangguran	95,76	Sangat Berhasil
Peningkatan minat investasi didukung pembangunan infrastruktur	Meningkatkan investasi di kawasan industri	421,60	Sangat Berhasil
Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	90,81	Sangat Berhasil
	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	-	-
	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	78,30	Berhasil
Mewujudkan ketahanan pangan yang handal	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	190,75	Sangat Berhasil



Tujuan	Sasaran	Rata-rata Capaian Tahun 2020 (%)	Interpretasi
	Meningkatkan distribusi pangan	93,07	Sangat Berhasil
Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing	Meningkatkan daya saing daerah	134,94	Sangat Berhasil
	Meningkatkan kerjasama perekonomian	225	Sangat Berhasil
Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa dan kelurahan	Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan	217,41	Sangat Berhasil
Memantapkan infrastruktur daerah	Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan	61,30	Cukup Berhasil
Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman	141,02	Sangat Berhasil
Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan	88,36	Sangat Berhasil
Optimalisasi PAD	Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi	17,42	Kurang Berhasil
Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	-	-
Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web	96	Sangat Berhasil
Meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaan	Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	100	Sangat Berhasil
Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan	114,94	Sangat Berhasil
Rata-rata Nilai Capaian Kinerja		115,81	Sangat Berhasil



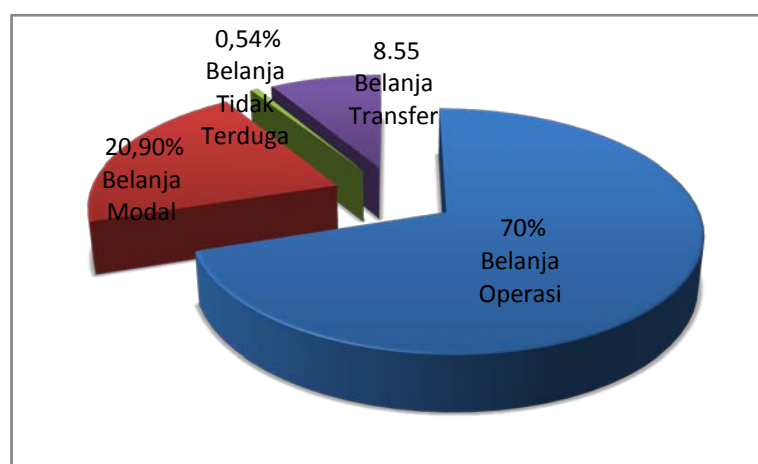
Efektivitas dan efisiensi alokasi belanja Negara dengan mengacu kepada penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Belanja daerah digunakan untuk mendukung berbagai agenda kebijakan strategis dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah diutamakan pada program prioritas yang mendesak untuk segera dilaksanakan berupa agenda pembangunan yang mempunyai dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut :

APBD Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021 sebesar Rp 1.901.444.220.132,00 dengan rincian sebagai realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 1.222.723.310.615,79 dan realisasi belanja sebesar Rp 1.128.312.802.397,08 sehingga terjadi surplus sebesar Rp 94.410.508.218,71. Sementara itu realisasi pembiayaan dari sisi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 13.216.714.882,40 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp 41.679.216.371,11.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 789.833.495.005,26, Belanja Modal sebesar Rp 235.849.172.856,82, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 6.108.404.841,00, dan Belanja Transfer sebesar 96.521.729.694,00.

Proporsi Realisasi Belanja pada APBD Tahun 2021



Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pada Tahun 2021 Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 13.216.714.882,40 berkurang sebesar Rp 79.975.664.767,6 dibanding Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 yang sebesar Rp 93.192.379.650,12. Pada Tahun 2021 terdapat Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, dengan jumlah Rp 65.948.006.730,00 sehingga di tahun 2021 Pembiayaan Neto Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar - Rp 52.731.291.847,60.

Laporan Realisasi APBD T.A 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Unaudited)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	2020
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.901.444.220.132,00	1.222.723.310.615,79	64,30%	1.329.210.020.255,99
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	52.107.703.388,00	25.627.497.245,00	49,18%	22.807.535.557,97
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	13.432.294.020,00	6.726.318.073,00	50,08%	10.617.471.344,25
1.1.3	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.078.067.000,00	2.487.623.482,61	13,76%	2.318.899.829,43
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64.369.834.329,00	53.050.724.615,74	82,42%	52.391.100.512,61
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	147.987.898.737,00	87.892.163.416,35	59,39%	88.135.007.244,26
1.2	PENDAPATAN TRANSFER				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	981.077.174.821,00	390.052.289.418,00	39,76%	546.298.177.702,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	280.388.087.000,00	271.407.999.000,00	96,80%	275.868.751.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	77.268.475.000,00	75.661.142.165,00	97,92%	43.214.328.612,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	63.849.814.000,00	51.984.325.602,00	81,42%	62.563.893.490,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.402.583.550.821,00	789.105.756.185,00	56,26%	927.945.150.804,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	55.643.691.000,00	55.643.691.000,00		27.240.345.000,00
1.2.2.2	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.2.2.3	Dana Keistimewaan	-	-	-	-
1.2.2.4	Dana Desa	38.775.111.000,00	38.775.111.000,00		36.490.369.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	94.418.802.000,00	94.418.802.000,00	100,00%	63.730.714.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi				
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	99.310.832.050,00	110.646.308.391,00	111,41%	84.662.542.089,00
1.2.3.3	Bantuan Keuangan	110.996.484.000,00	110.996.484.000,00	100,00%	115.760.002.756,00



Nomor Urut	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	2020
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	210.307.316.050,00	221.642.792.391,00	105,39%	200.422.544.845,00
	Total Pendapatan Transfer	1.707.309.668.871,00	1.105.167.350.576,00	64,73%	1.192.098.409.649,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah	18.582.140.000,00	2.661.500.000,00	14,32%	48.976.603.362,73
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan lainnya	27.564.512.524,00	27.002.296.623,44	97,96%	-
	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	46.146.652.524,00	29.663.796.623,44	64,28%	48.976.603.362,73
	Jumlah Pendapatan	1.901.444.220.132,00	1.222.723.310.615,79	64,30%	1.329.210.020.255,99
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.1	Belanja Pegawai	511.203.026.470,00	380.071.503.726,00	74,35%	519.277.167.778,00
2.1.2	Belanja Barang	694.444.692.377,00	382.056.294.436,26	55,02%	290.481.608.692,81
2.1.3	Belanja Bunga	21.663.420.907,00	16.637.316.584,00	76,80%	10.784.834.528,00
2.1.5	Belanja Hibah	41.573.108.650,00	8.375.936.894,00	20,15%	30.245.333.900,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.145.600.000,00	2.692.443.365,00	85,59%	1.088.000.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	1.272.029.848.404,00	789.833.495.005,26	62,09%	851.876.944.898,81
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.1	Belanja Tanah	24.594.646.608,00	292.827.035,00	1,19%	6.037.048.468,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	76.207.027.483,00	48.618.407.921,82	63,80%	77.882.221.674,90
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	84.541.603.962,00	29.258.742.850,00	34,61%	99.011.646.613,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	342.687.463.231,00	152.323.787.009,00	44,45%	174.169.216.670,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.738.950.538,00	5.355.408.041,00	93,32%	4.240.109.317,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	533.769.691.822,00	235.849.172.856,82	44,19%	361.340.242.742,90
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	9.599.988.300,00	6.108.404.841,00	63,63%	57.840.705.125,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	9.599.988.300,00	6.108.404.841,00	63,63%	57.840.705.125,00
2.4	BELANJA TRANSFER				
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000.000,00	5.000.000.000	-	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	-	-	771.813.476,00
2.4.3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	121.930.994.839,00	91.521.729.694	-	115.521.252.939,00
2.4.4	Belanja Transfer Dana Otonomi - Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	13.722.064.675,00	-	-	-
	Jumlah Belanja Transfer	140.653.059.514,00	96.521.729.694,00		116.293.066.415,00
	Jumlah Belanja	1.956.052.588.040,00	1.128.312.802.397,08	57,68%	1.387.350.959.181,71
	Surplus/ (Defisit)	(54.608.367.908,00)	94.410.508.218,71	172,89%	(58.140.938.925,72)



Nomor Urut	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	2020
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	155.839.043.548,00	13.216.714.882,40	8,48%	93.192.379.650,12
3.1.1	Penggunaan SILPA	5.839.043.548,00	13.216.714.882,40	226,35%	93.192.379.650,12
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah-Pemerintah Pusat	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah-Pemerintah Daerah Lain	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pinjaman Daerah-Lembaga Keuangan Bank	150.000.000.000,00	-	0,00%	-
3.1.7	Penerimaan Pinjaman Daerah-Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-
3.1.8	Penerimaan Pinjaman Daerah-Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-	-	-
3.1.9	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.10	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	155.839.043.548,00	13.216.714.882,40	8,48%	93.192.379.650,12
3.2	PENGELUARAN DAERAH	101.230.675.640,00	65.948.006.730,00	65,15%	21.834.725.842,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	46.100.000.000,00	19.600.000.000,00	42,52%	9.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-	-
3.2.4	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	-	-	-	-
3.2.5	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
3.2.6	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	55.130.675.640,00	46.348.006.730,00	84,07%	12.334.725.842,00
3.2.7	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-	-	-
3.2.8	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.2.9	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	101.230.675.640,00	65.948.006.730,00	65,15%	21.834.725.842,00
	Pembiayaan Neto	54.608.367.908,00	(52.731.291.847,60)	-96,56%	71.357.653.808,12
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	41.679.216.371,11	-	13.216.714.882,40



Realisasi anggaran pada program-program yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja 2021 dirincikan sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Berdasarkan Program T.A 2021

No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.577.592.630,00	2.727.055.952,00	48,89
2	Program Aplikasi Informatika	5.293.304.630,00	835.681.500,00	15,79
3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	22.052.598.159,00	10.881.884.594,00	49,35
4	Program Hubungan Industrial	119.145.668,00	75.646.800,00	63,49
5	Program Informasi dan Komunikasi Publik	3.453.284.131,00	941.557.800,00	27,27
6	Program Kawasan Permukiman	88.950.000,00	70.000.000,00	78,70
7	Program Kepegawaian Daerah	9.192.015.933,00	4.810.660.209,00	52,34
8	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.430.992.040,00	794.086.364,00	55,49
9	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000,00	2.772.000,00	55,44
10	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	124.998.991,00	21.470.100,00	17,18
11	Program Pelayanan Penanaman Modal	435.708.350,00	78.003.900,00	17,90
12	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	43.997.750,00	16.061.500,00	36,51
13	Program Pemasaran Pariwisata	199.000.000,00	48.849.600,00	24,55
14	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	54.059.544,00	36.907.100,00	68,27
15	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	921.134.000,00	709.758.560,00	77,05
16	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	49.785.000,00	30.023.100,00	60,31
17	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.717.462.159,00	445.331.582,00	25,93
18	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	984.597.358,00	310.213.524,00	31,51
19	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	16.459.165.620,00	10.836.445.615,00	65,84
20	Program Pemberdayaan Sosial	33.173.166,00	28.664.500,00	86,41
21	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2.878.240.000,00	2.838.479.515,00	98,62
22	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	767.248.895,00	290.786.250,00	37,90
23	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	58.335.000,00	39.088.100,00	67,01
24	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	43.745.500,00	24.988.500,00	57,12
25	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.599.278.549,00	1.131.009.578,00	70,72
26	Program Pembinaan Perpustakaan	10.854.743.109,00	10.267.667.282,00	94,59
27	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	42.831.500,00	36.022.860,00	84,10
28	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	155.420.518.061,00	129.424.139.396,60	83,27



No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
29	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	27.649.309.447,00	5.802.798.278,00	20,99
30	Program Penanganan Bencana	26.983.200,00	26.940.000,00	99,84
31	Program Penanganan Kerawanan Pangan	42.665.000,00	13.444.625,00	31,51
32	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	34.792.800,00	17.009.700,00	48,89
33	Program Penanggulangan Bencana	32.803.608.053,00	6.527.336.166,00	19,90
34	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	34.862.790.748,00	6.303.653.526,00	18,08
35	Program Penataan Bangunan Gedung	72.553.607.675,00	6.672.974.338,00	9,20
36	Program Penataan Desa	32.824.300,00	-	-
37	Program Pencatatan Sipil	90.614.506,00	81.682.610,00	90,14
38	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	815.587.038,00	414.930.700,00	50,88
39	Program Pendaftaran Penduduk	953.262.332,00	910.312.025,00	95,49
40	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	60.488.084.400,00	31.088.675.600,00	51,40
41	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.289.221.846,00	1.806.153.546,00	28,72
42	Program Penempatan Tenaga Kerja	24.999.387,00	17.921.100,00	71,69
43	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	210.534.500,00	65.687.760,00	31,20
44	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	18.310.000,00	8.910.500,00	48,66
45	Program Pengawasan Keamanan Pangan	36.371.319,00	30.767.600,00	84,59
46	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	166.475.307,00	25.909.900,00	15,56
47	Program Pengelolaan Arsip	106.702.692,00	74.511.774,00	69,83
48	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.921.088.040,00	1.049.671.200,00	54,64
49	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	86.277.272.771,00	42.628.063.491,00	49,41
50	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	20.100.916.954,00	4.821.364.820,00	23,99
51	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	38.236.200,00	25.332.400,00	66,25
52	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	459.197.272,00	173.310.638,00	37,74
53	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	10.436.195.157,00	7.665.129.447,00	73,45
54	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	181.968.848.933,00	124.646.618.023,00	68,50
55	Program Pengelolaan Pelayaran	669.818.812,00	276.111.600,00	41,22
56	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.591.574.310,00	745.009.438,00	46,81
57	Program Pengelolaan Pendidikan	91.759.032.151,00	55.272.977.852,48	60,24
58	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.920.164.665,00	447.953.062,00	23,33
59	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.396.656.077,00	1.632.339.364,00	37,13
60	Program Pengelolaan Persampahan	13.382.613.193,00	9.237.274.976,00	69,02
61	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	49.325.000,00	37.675.000,00	76,38
62	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	30.946.463.251,00	13.823.595.519,00	44,67
63	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	628.939.921,00	3.510.000,00	0,56



No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
64	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	39.784.000,00	18.605.000,00	46,77
65	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	229.457.620,00	31.308.610,00	13,64
66	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	101.003.030,00	3.059.000,00	3,03
67	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.989.030.292,00	1.418.257.858,00	28,43
68	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	915.732.944,00	226.489.500,00	24,73
69	Program Pengembangan Kebudayaan	667.634.695,00	366.078.975,00	54,83
70	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	199.136.000,00	18.366.000,00	9,22
71	Program Pengembangan Permukiman	11.656.782.510,00	6.149.997.308,00	52,76
72	Program Pengembangan Perumahan	396.584.776,00	177.602.120,00	44,78
73	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	182.587.250,00	107.741.530,00	59,01
74	Program Pengembangan UMKM	489.904.000,00	-	-
75	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.295.722.324,00	1.020.532.000,00	78,76
76	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	601.808.516,00	445.520.560,00	74,03
77	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	398.440.000,00	41.055.650,00	10,30
78	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	99.438.050,00	34.529.000,00	34,72
79	Program Pengendalian Penduduk	268.591.515,00	246.448.180,00	91,76
80	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	38.611.147,00	32.875.361,00	85,14
81	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	55.831.912,00	25.438.312,00	45,56
82	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	43.926.000,00	18.269.800,00	41,59
83	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	307.374.643,00	19.360.000,00	6,30
84	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	574.137.198,00	371.637.950,00	64,73
85	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10434082640	7487534898	71,76
86	Program Peningkatan Kerjasama Desa	93.377.670,00	16.519.651,00	17,69
87	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.461.098.239,00	6.457.577.643,00	86,55
88	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	266.593.000,00	77.140.800,00	28,94
89	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	21.402.000,00	7.960.800,00	37,20
90	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	21.214.500,00	17.008.400,00	80,17
91	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	236.846.000,00	47.701.200,00	20,14
92	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	45.450.914.491,00	31.863.566.322,00	70,11
93	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.757.076.349,00	3.335.200.412,00	88,77
94	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	639.272.148.581,00	460.130.867.291,00	71,98



No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
95	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.394.508.910,00	1.774.205.294,00	52,27
96	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.418.647.201,00	1.971.575.829,00	81,52
97	Program Penyelenggaraan Jalan	258.211.764.349,00	86.175.131.194,00	33,37
98	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.446.125.181,00	259.052.929,00	17,91
99	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	15593695272	9780119670	62,72
100	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.499.331.064,00	403.375.034,00	26,90
101	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.303.808.883,00	747.363.009,00	57,32
102	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	47.924.608,00	-	-
103	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	526.752.300,00	9.541.700,00	1,81
104	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	51.420.681,00	29.337.751,00	57,05
105	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	555.200.098,00	280.646.930,00	50,55
106	Program Penyuluhan Pertanian	1.301.354.114,00	1.005.891.844,00	77,30
107	Program Perekonomian dan Pembangunan	5.344.409.710,00	1.879.005.928,00	35,16
108	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	813.620.085,00	304.419.608,00	37,42
109	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	24.999.761,00	22.202.850,00	88,81
110	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	47.121.500,00	11.864.500,00	25,18
111	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.779.819.284,00	748.631.143,00	26,93
112	Program Perizinan Usaha Pertanian	195.388.852,00	150.310.000,00	76,93
113	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	661.022.633,00	527.763.394,00	79,84
114	Program Perlindungan Khusus Anak	290.745.000,00	27.405.550,00	9,43
115	Program Perlindungan Perempuan	97.038.500,00	89.593.625,00	92,33
116	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	672.633.230,00	-	-
117	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	228.747.462,00	52.590.550,00	22,99
118	Program Promosi Penanaman Modal	101.382.080,00	18.713.000,00	18,46
119	Program Rehabilitasi Sosial	305.823.914,00	175.805.730,00	57,49
120	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	214.451.000,00	147.613.200,00	68,83
121	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	68.691.000,00	42.473.350,00	61,83
122	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	13.983.000,00	1.845.000,00	13,19
Jumlah Anggaran		1.952.430.674.564,00	1.126.979.541.103,08	57,72



Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan serta sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pemerintah daerah dalam rangka akuntabilitas dan transparansi.

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 rata-rata menggambarkan kinerja yang sangat baik. Dari 19 sasaran strategis yang ditetapkan hampir seluruhnya berhasil dicapai dengan sangat baik namun masih ada beberapa indikator kinerja sasaran yang capaiannya kurang baik atau belum optimal.

Capaian kinerja yang sudah sangat baik maupun yang belum menjadi suatu motivasi untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun depan. Dari hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021, dapat dirumuskan beberapa strategi solusi bagi kendala yang ada dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan kinerja yang lebih baik, sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh OPD pada setiap kesempatan tentang pentingnya Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu dan akurasi data yang dihimpun.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan secara berkala atas efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan komitmen jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan.

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ini mampu dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan

datang, yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa adanya perbaikan-perbaikan di berbagai sektor sebagaimana dijelaskan di atas.



LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,13 ± 1 %
2	Pengurangan Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,825 %
3	Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri	Nilai Investasi	Rp 101.584.950.000
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-Rata Lama Sekolah	14,92 Tahun
		Harapan Lama Sekolah	10,79 Tahun
		Angka Harapan Hidup	71,75 Tahun
5	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	3 Medali
6	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,82 %
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	640 Poin

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
7	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan Terhadap PDRB	12 %
8	Meningkatkan Distribusi Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	90,04
9	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Tingkat Kunjungan Wisata	80.501 Orang
		NTP	104
		Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif	137 WUB
10	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani	500 Izin
11	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Status Desa	Mandiri = 0 Desa Maju = 8 Desa Berkembang= 22 Desa Tertinggal= 0 Desa Sangat Tertinggal = 0 Desa
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	24 Kelurahan dan 30 Desa (86%)
		Persentase Kemiskinan	7,05 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
12	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap	181 Km
		Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa	35.990 Ha
		Persentase Pemukiman yang Tertata	99,80 %
		Jumlah SPAM yang Dikelola Masyarakat	200
		Jumlah Bangunan/ Gedung Terbangun	3 Bangunan/ Gedung
		Penurunan Angka Kecelakaan Darat dan Perairan	9 %
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70.50
13	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya	91 %
		Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat	20
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan	Prosentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	75 %
		Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	<12 Jam
		Prosentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	77 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
		Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	150 Ha
15	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi	Peningkatan PAD	Rp 286.105.533.454
16	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKjIP)	B
17	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	50 Aplikasi
18	Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama	0 Kasus
19	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	87 %

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	635.860.527.604
2	Program Pengelolaan Pendidikan	74.074.979.052
3	Program Pendidikdan Tenaga Kependidikan	70.428.684.400
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	111.660.951.544
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.651.262.636
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	214.451.000
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	947.619.007
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	28.880.761.000
9	Program Pengelolaandan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	20.447.671.440
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	39.571.368.000
11	Program Pengembangan Permukiman	14.124.034.553
12	Program Penataan Bangunan Gedung	55.601.416.000
13	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	29.424.750.120
14	Program Penyelenggaraan Jalan	221.576.915.046
15	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	619.999.995
16	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.163.129.468
17	Program Pengembangan Perumahan	478.898.483
18	Program Kawasan Permukiman	150.527.569
19	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	735.968.230
20	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	45.883.644.003

No.	Program	Anggaran (Rp)
21	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.571.119.917
22	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	868.993.038
23	Program Penanggulangan Bencana	23.384.981.437
24	Program Pemberdayaan Sosial	38.113.966
25	Program Rehabilitasi Sosial	376.033.914
26	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	161.081.882
27	Program Penanganan Bencana	41.783.200
28	Program Pelatihan Kerjadan Produktivitas Tenaga Kerja	124.998.991
29	Program Penempatan Tenaga Kerja	24.999.387
30	Program Hubungan Industrial	124996568
31	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	210.534.500
32	Program Perlindungan Perempuan	42.728.500
33	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	77.920.334
34	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	49.325.000
35	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	42.831.500
36	Program Perlindungan Khusus Anak	345.050.400
37	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1.349.996.717
38	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	574.137.198
39	Program Penanganan Kerawanan Pangan	42.665.000
40	Program Pengawasan Keamanan Pangan	36.371.319

No.	Program	Anggaran (Rp)
41	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	555.200.282
42	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	6.001.061.474
43	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	47.121.500
44	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	99.438.050
45	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	58.335.000
46	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	21.214.500
47	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	38.611.147
48	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	34.792.800
49	Program Pengelolaan Persampahan	13.354.807.193
50	Program Pendaftaran Penduduk	852.070.534
51	Program Pencatatan Sipil	90.614.506
52	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	560.391.272
53	Program Penataan Desa	80.272.300
54	Program Peningkatan Kerjasama Desa	445.471.670
55	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.840.893.690
56	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.586.067.619
57	Program Pengendalian Penduduk	268.591.746
58	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.599.278.643
59	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	921.136.200

No.	Program	Anggaran (Rp)
60	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.035.847.555
61	Program Pengelolaan Pelayaran	669.818.812
62	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.753.284.131
63	Program Aplikasi Informatika	6.193.309.430
64	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	18.310.000
65	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	49.785.000
66	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	170.688.056
67	Program Pengembangan UMKM	489.904.000
68	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	299.992.070
69	Program Promosi Penanaman Modal	109.999.810
70	Program Pelayanan Penanaman Modal	473.416.350
71	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	421.990.000
72	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	125.639.700
73	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3.005.732.944
74	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.989.034.040
75	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	526.752.300
76	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	47.924.608
77	Program Pengembangan Kebudayaan	693.245.984
78	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	699.136.000

No.	Program	Anggaran (Rp)
79	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	44.242.100
80	Program Pembinaan Perpustakaan	10.993.270.261
81	Program Pengelolaan Arsip	129.699.227
82	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.009.603.723
83	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.910.847.115
84	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	214.249.493
85	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	203.936.828
86	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	308.774.643
87	Program Pemasaran Pariwisata	240.000.000
88	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	39.784.000
89	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	188.971.600
90	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.640.957.849
91	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.429.348.260
92	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	601.808.516
93	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.295.792.324
94	Program Perizinan Usaha Pertanian	195.388.852
95	Program Penyuluhan Pertanian	1.301.354.114
96	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.206.445.669
97	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	68.691.000

No.	Program	Anggaran (Rp)
98	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	13.983.000
99	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	691.209.845
100	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	24.999.761
101	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	30.180.351.297
102	Program Perekonomian dan Pembangunan	5.314.009.698
103	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	26.471.544.609
104	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.909.835.284
105	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.478.604.540
106	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	221.839.052.488
107	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.846.170.740
108	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.801.599.360
109	Program Kepegawaian Daerah	9.973.497.958
110	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.402.610.646
111	Program Penyelenggaraan Pengawasan	788.760.628
112	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	334.824.131
113	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	14.744.924.126
114	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	26.935.865.736
115	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	538.394.032
116	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	751.397.161

No.	Program	Anggaran (Rp)
117	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000
118	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	43.926.000
119	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.093.749.476
120	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	84.059.544
121	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	43.745.500
122	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	246.567.000
Jumlah Anggaran		1.838.797.250.968,00

Penajam, Februari 2021
Bupati Penajam Paser Utara

H. Abdul Gafur Mas'ud, S.E, M.E



Rencana Kinerja Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUNAN

KABUPATEN : PENAJAM PASER UTARA
TAHUN : 2021

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,13 ± 1 %
2	Pengurangan Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,825 %
3	Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri	Nilai investasi	101.584.950.000 Rupiah
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	14,92 Tahun
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	10,79 Tahun
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,75 Tahun
5	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh Dalam Berbagai <i>Event</i> Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	3 Medali
6	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	72,82 %
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	640 Skor
7	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	12 %

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	
8	Meningkatkan Distribusi Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	90,04	Skor
9	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	80.501	Orang
		NTP	104	Indeks
		Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif	137	WUB
10	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani	500	Perizinan
11	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Status Desa	Mandiri = 0 Maju = 8 Berkembang = 22 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0 Desa	
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	24 kelurahan dan 30 desa % 86	
		Persentase kemiskinan	7,05	%
12	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap	181	Km
		Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa (Ha)	35,990	Ha
		Persentase Pemukimanyang Tertata	99,80	%
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dikelola Masyarakat	200	SPAM

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
		Jumlah Bangunan/ Gedung Terbangun	3 Unit
		Penurunan Angka Kecelakaan Darat dan Perairan	9 Kejadian
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,50 Indeks
13	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya (%)	91 %
		Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat	20 Ha
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan	Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	75 %
		Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	< 12 Jam
		Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	77 %
		Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	150 Ha
15	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi	Peningkatan PAD	286.105.533.454 Rupiah
16	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKjIP)	B
17	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	50 Aplikasi

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
18	Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama	0 Kasus
19	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	87 %



Pengukuran Kinerja

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Realisasi
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,13 ± 1	%	-1,69	%	-53,99
2	Pengurangan Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,825	%	2,95	%	95,76
3	Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri	Nilai investasi	101.584.950.000	Rupiah	428.286.880.000	Rupiah	421,60
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	14,92	Tahun	8,36	Tahun	56,03
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	10,79	Tahun	12,57	Tahun	116,50
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,75	Tahun	71,68	Tahun	99,90
5	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh Dalam Berbagai <i>Event</i> Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	3	Medali	-	Medali	-
6	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	72,82	%	49,75	%	68,32
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	640	Skor	565	Skor	88,28
7	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	12	%	22,89	%	190,75
8	Meningkatkan Distribusi Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	90,04	Skor	83,80	Skor	93,07
9	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	80.501	Orang	105.019	Orang	130,46
		NTP	104	Indeks	-	Indeks	-

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Realisasi
		Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif	137	WUB	191	WUB	139,42
10	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani	500	Perizinan	1.125	Perizinan	225
11	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Status Desa	Mandiri = 0 Maju = 8 Berkembang = 22 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Desa	Mandiri = 5 Maju = 14 Berkembang = 11 Tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Desa	500
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	24 kelurahan dan 30 desa	%	24 kelurahan dan 30 desa	%	59,60
			86		51,26		
		Persentase kemiskinan	7,05	%	7,61	%	92,64
12	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/ Mantap	181	Km	48,15	Km	26,60
		Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa (Ha)	35,990	Ha	18,489	Ha	51,37
		Persentase Pemukiman yang Tertata	99,80	%	99,75	%	99,95
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dikelola Masyarakat	200	SPAM	4	SPAM	2

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Realisasi
		Jumlah Bangunan/ Gedung Terbangun	3	Unit	4	Unit	133,33
		Penurunan Angka Kecelakaan Darat dan Perairan	9	Kejadian	52	Kejadian	17,31
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,50	Indeks	69,47	Indeks	98,54
13	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya (%)	91	%	98,65	%	108,41
		Luas Lahan Milik Pemerintah yang Telah Bersertifikat	20	Ha	32,47	Ha	162,35
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan	Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	75	%	70	%	93,33
		Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	< 12	Jam	<6	Jam	200
		Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca bencana	77	%	34	%	44,16
		Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	150	Ha	198,84	Ha	132,56
15	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi	Peningkatan PAD	286.105.533.454	Rupiah	49.835.927.455	Rupiah	17,42
16	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKjIP)	B		-		-
17	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	50	Aplikasi	48	Aplikasi	96

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Realisasi
18	Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama	0	Kasus	0	Kasus	100
19	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	87	%	100	%	114,94

Jumlah Anggaran Perubahan Tahun 2021 : Rp 1.952.430.674.564,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2021 : Rp 1.126.979.541.103,08



Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6 (4 - 5)
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-53,99	81,11	-135,10
2	Pengurangan Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	95,76	42,74	53,02
3	Meningkatkan Investasi di Kawasan Industri	Nilai investasi	421,6	16,16	405,44
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	56,03	56,72	-0,69
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	116,5	56,72	59,78
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	99,9	82,23	17,67
5	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	-	28,43	-
6	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	68,32	54,06	14,26
		Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	88,28	19,01	69,27
7	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	190,77	53,98	136,79
8	Meningkatkan Distribusi Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	93,07	32,71	60,36
9	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	130,46	36,30	94,16
		NTP	-	63,86	-
		Peningkatan Jumlah WUB yang Kompetitif	139,42	81,60	57,82
10	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang Tertangani	225	16,16	208,84

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6 (4 - 5)
11	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Status Desa	500	58,08	441,92
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	59,6	49,72	9,88
		Persentase Kemiskinan	92,64	23,28	69,36
12	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik/ Mantap	26,6	33,37	-6,77
		Luas Area Daerah Irigasi, Daerah Irigasi Rawa (Ha)	51,37	48,16	3,21
		Persentase Pemukiman yang Tertata	99,95	21,38	78,57
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dikelola Masyarakat	2	23,99	-21,99
		Jumlah Bangunan/ Gedung Terbangun	133,33	9,20	124,13
		Penurunan Angka Kecelakaan Darat dan Perairan	17,31	25,29	-7,98
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	98,54	72,82	25,72
13	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Penataan Perumahan dan Permukiman	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya (%)	108,41	12,28	96,13
		Luas Lahan Milik Pemerintah yang telah Bersertifikat	162,35	9,20	153,15
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan serta Pemulihan Akibat Bencana Secara Terpadu dan Berkelanjutan	Persentase Meningkatnya Kapasitas Daerah Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana	93,33	19,90	73,43
		Rata-Rata Waktu Respon Kejadian Bencana	200	19,90	180,10
		Persentase Peningkatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	44,16	19,90	24,26
		Terjaganya Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	132,56	50,88	81,68
15	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ektensifikasi	Peningkatan PAD	17,42	46,81	-29,39

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6 (4 - 5)
16	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKjIP)	-	71,98	-
17	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	96	20,32	75,68
18	Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Kasus/ Konflik yang Bernuansa Agama	100	36,29	63,71
19	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	114,94	86,55	28,39